

**STRATEGI KEBIJAKAN MONETER MENGHADAPI
ANCAMAN RESESI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI
DI INDONESIA TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh

VINA CHOIRUN NISA

NIM: G01219032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Saya Vina Choirun Nisa dengan NIM (G01219032), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Mei 2023



Vina Choirun Nisa

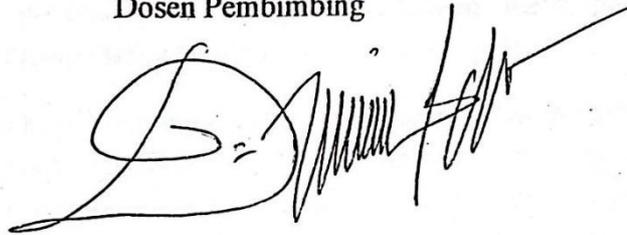
NIM. G01219032

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 23 Mei 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Koerniawati', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., AK., CA

NIP. 198507122019032010

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI KEBIJAKAN MONETER MENGHADAPI ANCAMAN RESESI DENGAN PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2022

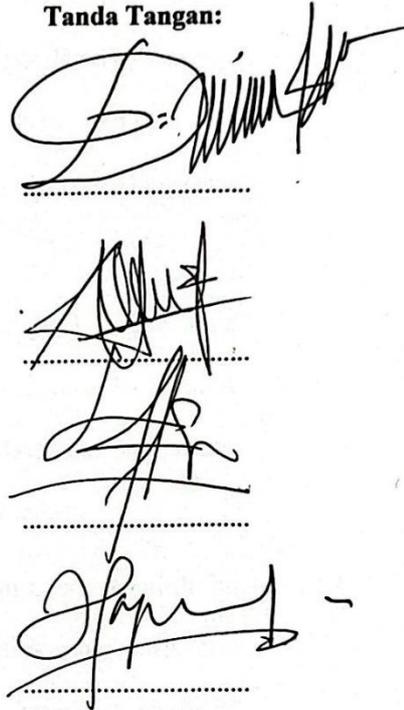
Oleh
Vina Choirun Nisa
NIM: G01219032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 09 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
Diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dwi Koerniawati, S.E., M.A., AK., CA
Nip. 198507122019032010
(Penguji 1)
2. Nurul Lathifah, S.A., M.A
Nip. 198905282018012001
(Penguji 2)
3. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
Nip. 198106062009012008
(Penguji 3)
4. Hapsari Wiji Utami, M.SE
Nip. 198603082019032012
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 16 Juni 2023



UIN Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
Nip. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Choirun Nisa
NIM : G01219032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : vinachoirunn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah

:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Kebijakan Moneter Menghadapi Ancaman Resesi dengan Pengendalian Inflasi di Indonesia
Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Penulis

(Vina Choirun Nisa)

ABSTRAK

Telah terjadi kontraksi tajam sehingga membuat *cash flow* negara menjadi *minus* atau defisit selama pandemi, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menggelontorkan stimulus besar-besaran (ekspansif) sebagai upaya *recovery* dengan harapan daya beli akan mengalami eskalasi sehingga GDP dapat mencapai target yang diinginkan, stimulus tersebut dinilai para ahli telah tepat sasaran yang ditandai dengan surplusnya *cash flow* negara secara perlahan, namun seiring berjalannya waktu dampak negatif mulai terlihat akibat digelontorkannya stimulus besar-besaran tersebut mengakibatkan kuantitas uang beredar melebihi batas wajar, hal itu digambarkan oleh tingkat inflasi dengan range tinggi, maka bank sentral dan kementerian mengatasinya menggunakan stimulus kontraktif.

Penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan strategi kebijakan moneter menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia tahun 2022, peneliti menggunakan informasi yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini telah terjadi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 5,51% akibat digelontorkannya stimulus ekspansif untuk *recovery* ekonomi *pasca* pandemi, inflasi yang mengalami eskalasi terus menerus menjadikan adanya peluang resesi di masa mendatang, sebelum hal itu terjadi pemerintah bekerja sama dengan bank sentral untuk mengontrol inflasi melalui kebijakan uang ketat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah stimulus kontraktif dinilai tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi dan menghadapi ancaman resesi melalui beberapa instrumen khususnya di lingkup moneter seperti eskalasi suku bunga, penjualan surat berharga, pengurangan kuantitas uang beredar, eskalasi *cash ratio* dan pemberian *credit selective control*.

Kata kunci: Badan pusat statistik, inflasi, kebijakan moneter, pandemi, resesi, stimulus.

ABSTRACT

There has been a sharp contraction that has made the country's cash flow minus or deficit during the pandemic. To overcome this, the government poured out a massive (expansive) stimulus as a recovery effort in the hope that purchasing power will escalate so that GDP can reach the desired target, the stimulus is assessed experts have been right on target which is marked by a gradual surplus in the country's cash flow, but over time the negative impact began to be seen due to the massive stimulus being launched which resulted in the quantity of money in circulation exceeding reasonable limits, this was illustrated by the inflation rate with a high range, so the bank the central government and ministries overcome it using contractionary stimulus.

The research used is a descriptive qualitative type, this study aims to analyze and explain the monetary policy strategy to face the threat of a recession by controlling inflation in Indonesia in 2022, the researchers used information from the Central Bureau of Statistics and Bank Indonesia.

The results obtained from this study indicate that there will be quite high inflation 5,51% in 2022 due to expansive stimulus for post-pandemic economic recovery, inflation that has continuously escalated creates opportunities for future recessions, before that happens the government is working with the central bank to control inflation through a tight money policy.

The conclusion of this study is that contractionary stimulus is considered to be right on target to control inflation and face the threat of recession through several instruments, especially in the monetary sphere, such as interest rate escalation, sale of securities, reduction of the quantity of money in circulation, escalation of cash ratios and provision of selective credit control.

Keywords: Central statistics, inflation, monetary policy, pandemi, recession, stimulus.

DAFTAR ISI

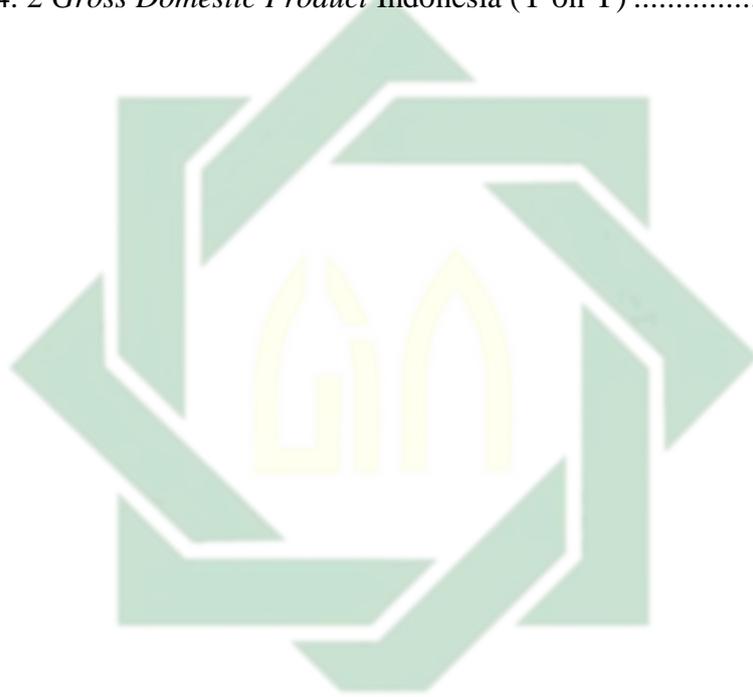
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Konseptual	44
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian.....	46

3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	48
3.6 Sistematika Penulisan.....	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
4.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	54
4.4 Pembahasan	56
BAB 5 PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
BIODATA MAHASISWA.....	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Inflasi Indonesia 2019-2022.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka konseptual.....	44
Gambar 4. 1 Pertumbuhan Keuangan Indonesia (C to C).....	55
Gambar 4. 2 <i>Gross Domestic Product</i> Indonesia (Y on Y)	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4. 1 Implementasi kebijakan Moneter pengendalian Inflasi.....	92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Telah terjadinya krisis besar pada tahun 2019 hingga membuat kakacauan dalam dunia perekonomian, kesehatan dan pariwisata, bukan hanya itu sejumlah aktifitas untuk pengiriman hasil produksi ke negara lain atau dengan kata lain ekspor di seluruh dunia juga mengalami gangguan, krisis tersebut dikenal dengan pandemi covid-19, virus berbahaya sekaligus mematikan yang dapat merenggut nyawa seseorang hingga keberlangsungan suatu negara dipertaruhkan, kemudian untuk mengatasi dampak hebat dari pandemi pemerintah, bank dunia dan pihak otoriter tiap negara memberikan suntikan dana kepada masyarakat agar roda perekonomian dapat berjalan dan berputar kembali, sehingga terciptalah *recovery* dan stabilisasi ekonomi, dimulai dari bangkitnya angka daya beli yang ditunjang oleh insentif pemerintah.

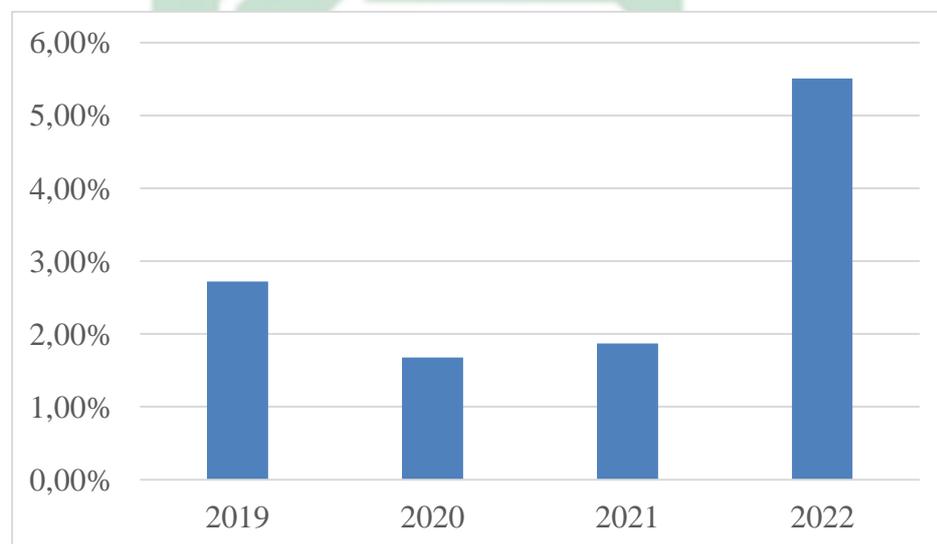
Dikatakan sebagai resesi saat suatu negara mengalami kemerosotan dalam Produk Domestik Brutonya (biasa disebut dengan PDB yang bermakna sebagai *income* suatu negara) selama dua kuartal berturut-turut, satu kuartal dalam ilmu ekonomi terhitung selama tiga bulan, sehingga jika diakumulasikan dapat disebut sebagai resesi saat kontraksi ekonomi tersebut terjadi selama 6 bulan (kuartal yang berurutan dalam hitungan tahun yang sama). Namun berbeda halnya dengan depresi ekonomi, depresi memiliki tingkatan lebih dalam jika dibandingkan dengan resesi suatu

negara, depresi jauh lebih berbahaya dan dampak yang ditimbulkan sangat kompleks bagi keberlangsungan suatu negara itu sendiri ataupun negara yang menjalin kerja sama dengannya, negara tersebut akan terancam kolaps saat depresi melanda.

Suatu negara dikatakan depresi saat resesi yang dialami berlanjut hingga kurun waktu lebih dari dua kuartal, Indonesia mengalami defisit pada *cash flow* sehingga telah dinyatakan masuk ke dalam resesi, penelitian yang dilakukan Khairul Akbar, Emmia Tembarta Kambaren, Ade Firmansyah Tanjung (2020) membuktikan bahwa Indonesia sempat terperosok ke dalam jurang resesi yang memiliki hasil: Pandemi telah membuat pengaruh yang besar bagi seluruh dunia, bukan hanya lingkup domestik saja, khususnya di bidang ekonomi, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami defisit *cash flow* dan volatilis inflasi tajam sehingga telah dinyatakan masuk ke dalam resesi, telah terjadi kontraksi pada pertumbuhan di lingkup moneter selama 2 kuartal lebih, yaitu -5,32% pada kuartal 2 tepatnya pada Bulan April hingga Juni dan pada kuartal selanjutnya terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang defisit, yaitu -3,49%, pembukuan defisit pada pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021, kemudian pada kuartal 4 2020 pertumbuhan ekonomi masih membukukan minus yaitu sebesar -2,19%, dan titik resesi di akhiri pada kuartal 1 2021 yaitu sebesar -0,74%,

Pada tahun 2021 kuartal 2 Indonesia mampu keluar dari resesi dan membukukan surplus 7,07%. informasi tersebut merupakan informasi yang

terdapat dalam badan pusat statistik, perlu diketahui bahwa 1 kuartal dalam ilmu ekonomi terhitung selama jangka waktu 3 bulan hingga dapat disimpulkan bahwa satu periode terdapat 4 kuartal. Selain itu adanya resesi di Indonesia juga diperkuat oleh beberapa bukti dalam fenomena lain yaitu adanya kontraksi pada daya beli, penyusutan kegiatan penanaman modal, kontraksi angka ekspor, eskalasi pengangguran dan lain-lain. (Badan Pusat Statistik, 2020)



Gambar 1.1 Inflasi Indonesia 2019-2022

Sumber: Bank Indonesia (Tahun 2019-2022)

Banyak sekali negara yang terancam depresi saat badai itu terjadi, hingga bank dunia (biasa disebut sebagai *world bank*) ikut mengintervensi perekonomian dunia dengan cara memberikan beberapa insentif seperti dana hibah, adanya stimulus keringanan pada utang yang dimiliki oleh negara berkaitan, memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan, adanya program peningkatan infrastruktur bagi *emerging market* (memiliki nama lain negara yang berkembang seperti Indonesia) sejumlah peningkatan yang

dilakukan bank dunia juga mencakup pada bidang kesehatan dan pendidikan, dari beberapa intensif yang ditawarkan oleh bank dunia jika diakumulasikan seluruhnya berjumlah kurang lebih sekitar US\$ 160, di mana satu dolarnya pada saat 13 oktober 2022 terhitung sebesar Rp. 15.324.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam lingkup domestik lebih terfokus pada pengontrolan suku bunga, sebab dari suku bunga itulah nantinya dapat memberi *impact* yang sangat besar terhadap volatilitas inflasi negara, hal ini dikuatkan oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mirna Shofa Hesti, Mohammad Ikhsan, Muhammad Rudy Alamsyah, Syahrul Munir (2022) yang memiliki hasil: tingkat suku bunga dengan inflasi mempunyai hubungan saling mempengaruhi terutama di kala resesi, serta terdapat beberapa strategi dalam pemulihan pasca pandemi (menggerakkan kembali roda ekonomi) salah satunya melalui pengendalian inflasi menggunakan kebijakan tingkat suku bunga yang ada di suatu negara.

Penelitian lain yang menjelaskan mengenai korelasi erat antara suku bunga dengan inflasi yaitu penelitian dari Suparman dan Kemu, Syahrir Ika (2018) yang memiliki hasil: Kebijakan BI rate adalah proses panjang untuk mewujudkan terkontrolnya tingkat inflasi suatu negara, selain itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan keseimbangan pembayaran. Bi rate memiliki nama lain sebagai politik diskonto (kebijakan diskonto), jika dalam Bahasa Inggris biasa disebut dengan *interest rate* yang memiliki makna sebagai suku bunga, itulah alasan

adanya perubahan persentase politik diskonto yang cukup volatile, hal itu dikarenakan instrumen *interest rate* menyesuaikan dengan kondisi moneter di suatu negara.

Untuk menghadapi *impact* dari krisis yang ada, selain pengontrolan suku bunga suatu negara juga membutuhkan kebijakan tepat sasaran atau kebijakan efektif, kebijakan tersebut di bagi menjadi tiga macam, yaitu kebijakan dalam lingkup fiskal, moneter serta non fiskal non moneter, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut beradaptasi pada situasi yang sedang terjadi atau dengan kata lain bergerak kondisional, apabila situasi perekonomian sedang membutuhkan suntikan dana untuk akselerasi eskalasi ekonomi, maka pemerintah bekerja sama baik dengan kementerian moneter maupun bank Indonesia untuk memberikan stimulus dalam lingkup ekspansif.

Contoh implementasi kebijakan ekspansif di bidang fiskal yaitu adanya penurunan pajak (seperti adanya insentif pajak penghasilan biasa disebut PPh), selain itu kebijakan lain yang diimplementasikan juga mencakup pada dana yang digelontorkan pemerintah pada waktu pandemi yang biasa disebut dengan istilah PEN yang awalnya hanya berjumlah Rp. 455,62 Triliun, kemudian stimulus tersebut disuntikkan lagi sebesar Rp. 695,2 Triliun, namun perlu diketahui bahwasanya stimulus yang di gelontorkan tersebut hanya mampu menjadikan inflasi naik tipis yaitu sebesar 1,68% pada 2020 menjadi 1,87% pada tahun 2021, pemerintah dan pihak terkait merasakan belum adanya perbaikan ekonomi yang cukup

maksimal, maka dari itu pemerintah menggelontorkan stimulus lain sebesar Rp. 744,7 triliun demi katalisator *recovery* ekonomi, sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan, maka akumulasi dana dalam upaya *recovery* pasca pandemi selama 3 tahun berjumlah Rp. 1.895,5 triliun, *recovery* bukan hanya mencakup pada bidang perbaikan ekonomi saja, melainkan juga digunakan untuk perbaikan dalam sektor kesehatan (baik berupa pembelian alat perlindungan diri atau APD, ranjang rumah sakit, oksigen, alat-alat kesehatan lain), stimulus tersebut juga dialokasikan pada sektor pemulihan UMKM yang memberi kontribusi cukup besar pada akumulasi GDP Indonesia, para dokter, perawat serta tenaga kesehatan juga diberi pemerintah insentif khusus sebagai biaya balas jasa, santunan pada tenaga medis yang mengalami kehilangan nyawa juga diberikan insentif oleh pemerintah dalam alokasi anggaran stimulus tersebut. (Finaka, 2021)

Stimulus yang digelontorkan sukses menjadikan Indonesia bangkit secara perlahan pada kuartal 2 2021 yang ditandai dengan surplusnya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%, pada saat itu Indonesia telah resmi keluar dari area resesi, adanya suntikan dana dan berbagai upaya pemerintah dilakukan demi mewujudkan kondisi stabilisasi perekonomian yang ada, bila terdapat ketidakseimbangan dalam suatu ekonomi maka negara yang berkaitan akan sangat mudah digoyangkan, efisiensi pada pemilihan kebijakan sangat diperlukan dalam upaya pengendalian tatanan perekonomian secara makro melalui berbagai instrumen, salah satunya yaitu kuantitas uang yang dipegang masyarakat. Informasi ini searah dengan

penelitian yang dikerjakan oleh Selena Blandina, Alvin Noor Fitriani, Wulan Septiyani (2020) yang memiliki hasil: Kebijakan yang diimplementasikan, baik lingkup moneter ataupun fiskal dapat menjauhkan suatu negara dari resesi, bukan hanya itu terdapat faktor lain untuk menjadikan stabilisasi perekonomian negara agar tidak jatuh ke dalam resesi, seperti tingginya tingkat produktivitas (dalam istilah pasar ekonomi biasa di sebut dengan *supply*) yang diimbangi dengan eskalasi *demand* masyarakat, positifnya *cash flow* dunia, dan eskalasi dalam daya saing.(Finaka, 2022)

Pandemi tersebut hingga saat ini masih ada, walaupun telah ditemukanya vaksin penangkal sebagai bentuk perlindungan tubuh terhadap virus, namun fakta di lapangan virus tersebut belum dapat hilang secara 100%, bahkan hingga sekarang tahun 2022 telah beredar informasi bahwasanya negeri panda (China) mengalami eskalasi tajam lagi untuk korban covid, namun puji syukur tuhan Indonesia pada tahun 2021 perlahan mampu bangkit dan keluar dari titik kemerosotan yang ditandai dengan perbaikan ekonomi, naiknya daya beli (angka permintaan akan suatu barang), eskalasi pada angka investasi, positifnya angka ekspor, adanya perbaikan pada lapangan suatu usaha, dan lain sebagainya. Di antara semua faktor tersebut yang memberi pengaruh signifikan terhadap *income* suatu negara ialah daya beli masyarakat yang memberi kontribusi kurang lebih sebesar 58% pada akumulasi GDP yang ada, informasi ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh Nanda Hidayati dan Muhammad Ali Maskuri (2020) yang memiliki hasil: adanya hubungan saling terkait

antara inflasi dengan banyaknya pengangguran terhadap volatilitas daya beli, jika daya beli mulai terpengaruh maka akan terjadi perubahan pada jumlah *gross domestic product* suatu negara.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Hal-hal di atas merupakan *impact* dari adanya eskalasi atau kuantitas pada jumlah uang yang dipegang masyarakat melalui insentif dan suntikan moneter pemerintah. Namun perlu diwaspadai kuantitas moneter masyarakat yang membengkak justru dapat menjadi malapetaka bagi sebuah negara, yaitu terciptanya kondisi *hyper* dalam ruang lingkup inflasi.

Volatilitas inflasi yang terjadi selama ini bersifat akomodatif yaitu menyesuaikan pada kondisi makro suatu negara, akan terjadi perubahan persentase inflasi pada tiap periode, berikut merupakan persentase inflasi menurut IHK di Indonesia pada tahun 2019-2022 yang bersumber dari informasi BPS dan Bank Indonesia: Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 2,72% kemudian terjadi penurunan inflasi akibat pandemi pada tahun berikutnya sehingga inflasi hanya berkisar 1,68%, kemudian pada tahun 2021 terdapat *recovery* secara perlahan sehingga eskalasi inflasi menjadi 1,87% *recovery* terus berlanjut dan mampu membuat inflasi berada pada angka yang cukup tinggi di tahun 2022 yaitu sebesar 5,51%.(Bank Indonesia, 2022)

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Strategi Kebijakan Moneter Menghadapi Ancaman Resesi Dengan Pengendalian Inflasi Di Indonesia Tahun 2022”** yang bertujuan menjabarkan nilai dan makna volatilitas inflasi di

Indonesia, penelitian ini berdampak pada pemberian wawasan kepada pembaca mengenai langkah bank sentral yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menghadapi ancaman resesi dalam mengatasi dan mengendalikan volatilitas inflasi. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Riski Ananda AP (2020) dengan judul “Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi” penelitian terdahulu lebih fokus pada cara untuk menstabilkan perekonomian, sedangkan penelitian saat ini fokus pada strategi untuk menghadapi ancaman resesi.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang tertulis dalam motif kerangka, penulis melakukan introduksi problematika pada skripsi dengan judul “Strategi Kebijakan Moneter Menghadapi Ancaman Resesi Dengan Pengendalian Inflasi Di Indonesia Tahun 2022” adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan inflasi di Indonesia.
- b. Ancaman resesi di Indonesia.
- c. Insentif untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
- d. Banyaknya kuantitas uang beredar yang ada di masyarakat.
- e. Strategi kebijakan moneter pengendalian inflasi.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar hasil yang dicapai dapat maksimal, peneliti membatasi problematika yang ada. Peneliti memusatkan pada masalah:

- a. Perkembangan inflasi di Indonesia.
- b. Strategi kebijakan moneter dalam menghadapi ancaman resesi di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam motif kerangka, ditetapkan rumusan masalah:

1. Bagaimana kondisi inflasi pada perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana strategi kebijakan moneter dalam menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan interpretasi problematika di atas, tujuan diadakanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kondisi inflasi pada perekonomian Indonesia.
2. Untuk mengetahui strategi kebijakan moneter menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia tahun 2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti baik dari segi keilmuan ataupun segi yang lain seperti praktik untuk para pembaca, sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan pola pikir

a. Untuk Peneliti

Secara teori, hasil penelitian ini memberikan ilmu dan pemahaman lebih dalam tentang ketidakstabilan inflasi, Perekonomian Indonesia dan Strategi Kebijakan Moneter Menghindari Ancaman Resesi Dengan Pengendalian Inflasi Di Indonesia Tahun 2022.

b. Untuk Jurusan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pemahaman seputar makna dalam volatilitas inflasi Perekonomian Indonesia dan Strategi Kebijakan Moneter Menghindari Ancaman Resesi Dengan Pengendalian Inflasi Di Indonesia Tahun 2022.

1.5.2 Kegunaan praktik

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan pemahaman tentang volatilitas inflasi pada Perekonomian Indonesia. Selain itu dapat menambah penafsiran peneliti dalam bidang Strategi Kebijakan Moneter Menghindari Ancaman Resesi Dengan Pengendalian Inflasi Di Indonesia Tahun 2022.

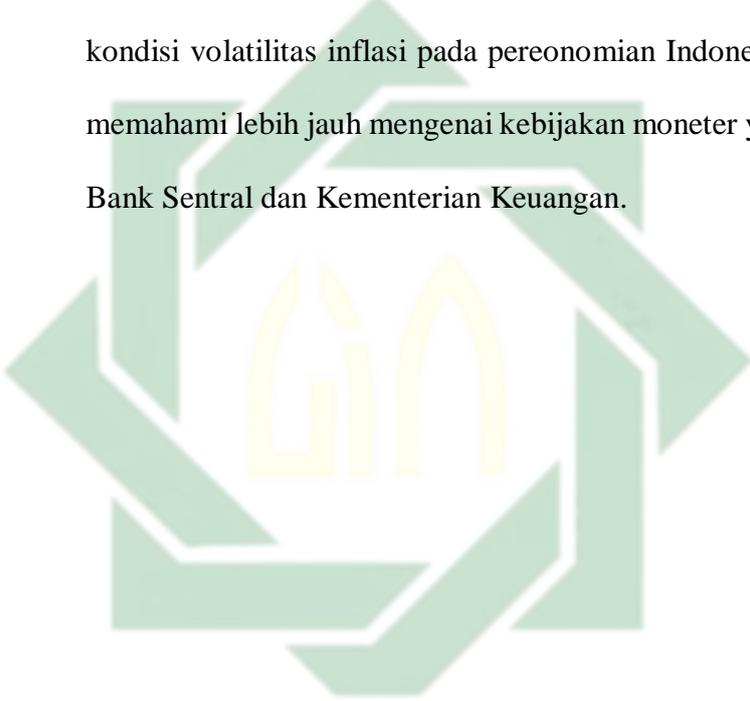
b. Untuk Bank Sentral dan Kementerian Keuangan

Adanya harapan dari penulis bahwa dengan keberadaan penelitian ini dapat menjadi pengarahannya untuk bank Sentral dan

Kementerian Keuangan semakin baik menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mewujudkan stabilisasi perekonomian Indonesia.

c. Untuk Masyarakat

Masyarakat Kota Surabaya dapat menafsirkan makna kondisi volatilitas inflasi pada perekonomian Indonesia serta dapat memahami lebih jauh mengenai kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Moneter

1. Teori Kebijakan Moneter

Beberapa teori pakar ekonomi mengenai kebijakan moneter, yang terdiri dari:

a. Perry Warjiyo

Menurut Perry Warjiyo yang menjabat sebagai Gubernur BI pada tahun 2018-2023 keuangan negara diatur oleh kebijakan moneter, kebijakan ini bersifat otoriter dan dioperasikan oleh bank sentral yang bernama Bank Indonesia (biasa disebut dengan istilah BI), hal ini dilakukan demi mencapai target berupa adanya eskalasi dan perkembangan ekonomi suatu negara yang tentunya roda aktivitas masyarakat khususnya dalam lingkup ekonomi menjadi sorotan utama dalam terealisasinya pencapaian yang diinginkan, bukan hanya itu faktor lain seperti fundamental dalam perekonomian turut menjadi hal penentu pengambilan stimulus negara khususnya di lingkup kebijakan moneter.(Warjiyo & Solikin, 2023)

b. Sadano Sukirno

Yang di maksud dengan kebijakan moneter ialah upaya yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank otoritas suatu negara untuk mengatur jumlah *money supply*, *interest rate* dan instrument lain dalam rangka bentuk pengawasan terhadap kredit dan investasi yang disalurkan bank umum pada masyarakat, hal tersebut merupakan teori dari penulis sekaligus tokoh ekonomi terkemuka, baik di bidang makro maupun mikro yang bernama Sadano Sukirno, di mana hasil tulisan beliau telah menjadi bahan refferensi di perguruan tinggi Indonesia.(Khusen, 2018)

c. Muana Nanga

Pihak otoritas moneter yaitu Bank Indonesia berhak untuk melakukan pengendalian pada kuantitas *money supply* dan juga penentuan *interest rate* dalam rangka mengatur jumlah *demand* dan memitigasi instabilitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter, hal ini diungkapkan oleh pakar ekonomi pembangunan yang bernama Muana Nanga.(Ahmad, 2022)

d. Mohammad Natsir

Segala strategi untuk pertumbuhan dan eskalasi variabel ekonomi baik berupa uang beredar, *exchange rate*, maupun *interest rate* yang dilakukan oleh bank sentral dalam upaya pencapaian target tertentu merupakan teori kebijakan moneter yang dinyatakan oleh Mohammad Natsir, menurut beliau kebijakan moneter

memiliki nama lain *monetary policy*, beliau merupakan seseorang yang ahli di bidang politik dan pernah menjabat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950.(Ahmad, 2022)

2. Pengertian Kebijakan Moneter

Untuk mengatur sirkulasi uang di suatu negara, maka pemerintah membuat sebuah program bernama kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh masing-masing bank otoritas (pusat) di tiap negara, seperti contoh di Indonesia terdapat Bank Indonesia sebagai bank otoritas (pusat), di Amerika Serikat terdapat Federal Reserve yang bertindak sebagai bank sentral, Bank of Japan sebagai bank pusat Jepang, dan lain-lain.

Bukan hanya itu, fungsi dari kebijakan moneter juga difungsikan untuk mengatur angka inflasi, suku bunga, harga dan kuantitas uang yang dipegang masyarakat, sebab hal tersebut nantinya dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi yang berakibat pada surplus atau defisitnya *cash flow* suatu bangsa, namun perlu diketahui bahwa dalam implementasi program ini dibutuhkan kebijakan lain seperti kebijakan di lingkup *fiscal* untuk mencapai sasaran *goals* pemerintah, perbedaan antara dua kebijakan ini terletak pada target yang dituju, jika moneter berfokus pada kuantitas uang beredar melalui BI rate, pengendalian inflasi, harga yang stabil, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan *fiscal* berfokus pada jumlah *income* dan anggaran yang tertuang dalam APBN bangsa. Berdasarkan Undang-

Undang pada nomor 23, tepatnya Tahun 1999 terdapat penjelasan mengenai kebijakan moneter Indonesia dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh bank otoritas negara yaitu bank sentral dengan nama BI.(Utami, 2021)

Langkah yang diimplementasikan sebagai pelaku dan penanggungjawab akan kuantitas peredaran uang merupakan wewenang dari BI dalam lingkup kebijakan moneter, sedangkan kebijakan fiskal lebih mengarah pada moneter pemerintah (berupa *income* dan *spending*), kebijakan moneter diatur dan dipegang oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, BI bekerja sama dengan kementerian khususnya di bidang moneter untuk mengatur alur perputaran dan kuantitas uang beredar yang dipegang masyarakat, bukan hanya itu kebijakan moneter juga memiliki wewenang untuk mengatur volatilitas inflasi, dan *interest rate* (biasa di sebut sebagai politik diskonto yang memiliki makna suku bunga) serta harga. Kebijakan moneter tidak bersifat independen (berdiri sendiri), kebijakan moneter membutuhkan pelengkap dalam mengimplementasikan kebijakanya untuk memaksimalkan target yang menjadi sasaran pemerintah yaitu berupa kebijakan fiskal dan kebijakan non moneter.

Keterkaitan teori para ahli mengenai kebijakan moneter dengan judul dalam penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada strategi, kebijakan dan langkah pemerintah khususnya Bank Indonesia yang

bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengatur kuantitas peredaran uang, harga dan suku bunga dalam rangka menjaga kondisi stabilisasi inflasi dan eskalasi pertumbuhan ekonomi, jika inflasi berada dalam persentase yang tinggi maka negara tersebut akan berpotensi mengalami kondisi resesi atau bahkan depresi ekonomi yang ditandai dengan gejala *hyper inflation* yaitu inflasi yang bergerak liar (di atas batas wajar) dan susah dikendalikan.

3. Jenis dan Instrumen Kebijakan Moneter

Terdapat dua jenis kebijakan lingkup moneter yaitu kebijakan dalam rangka ekspansif dan kontraktif, kedua kebijakan tersebut akan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang terjadi di suatu negara atau dalam kata lain bergerak kondisional. Saat suatu negara membutuhkan lebih banyak kuantitas uang untuk dipegang masyarakat demi eskalasi daya beli dan perputaran roda ekonomi, kebijakan ekspansif akan diimplementasikan, selain itu saat terjadi jatuhnya perekonomian seperti adanya krisis atau bahkan depresi ekonomi, tingginya angka dari pengangguran maka pemerintah akan berusaha memperbaiki keadaan melalui instrumen yang berada dalam kebijakan ekspansif, contoh instrumen ekspansif yaitu adanya penurunan pada GWM (Giro Wajib Minimum yaitu tabungan minimal bank umum baik bank konvensional maupun syariah, yang disimpan dan diserahkan ke BI), penurunan persentase suku bunga yang dijadikan patokan bank umum, dan pembelian surat yang dinilai berharga (hal ini biasa disebut

dengan istilah *open market*), hal itu dilaksanakan demi menambah kuantitas peredaran uang yang ada di masyarakat, jika kuantitas uang beredar bertambah maka besar kemungkinan GDP akan mengalami eskalasi dan membukukan surplus pada *cash flow* negara yang biasanya ditandai dengan eskalasi kontribusi angka konsumsi.

Jika ekspansif bersifat agresif untuk menaikkan *cash flow* negara, maka dari itu terdapat kebijakan lain yang memiliki sifat bertolak belakang dengan kebijakan ekspansif yaitu kebijakan moneter kontraktif, yang bertujuan untuk menarik uang secara perlahan melalui beberapa instrumen antara lain: eskalasi suku bunga yang dijadikan acuan, eskalasi simpanan minimal bank umum kepada Bank Indonesia yang memiliki nama lain giro wajib minimum, dan penjualan surat yang dinilai berharga. Kebijakan kontraktif ini diimplementasikan saat inflasi mulai melebihi batas wajar, sebelum terjadi *hyper inflation* (inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali sehingga berpotensi adanya resesi hingga depresi) maka Bank Indonesia melakukan himbuan moral kepada bank umum terkait langkah yang harus diambil dan mengimplementasikan instrumennya sesuai kondisi yang terjadi.

2.1.2 Resesi

1. Teori Resesi

Berikut merupakan beberapa teori menurut ekonom tentang resesi:

a. Sri Mulyani

Inflasi yang ekstrem dapat membuat harga barang naik secara tajam, hal itu tentunya menjadikan bank sentral menaikkan suku bunganya, jika hal tersebut berlangsung lama maka akan berdampak pada kontraksi *cash flow* suatu negara hingga berujung turunya *Gross Domestic Product* yang ditandai dengan kontraksi pada daya beli yang ada, jika penurunan berlanjut selama dua kuartal yaitu kurang lebih dalam hitungan enam bulan berturut-turut pada satu periode maka negara tersebut telah dinyatakan masuk ke kondisi resesi, perlu diketahui bahwasanya angka C yang memiliki makna konsumsi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap *income* Indonesia, konsumsi sendiri memberi sumbangsih kurang lebih sekitar 60% pada akumulasi penerimaan *cash flow* yang ada, maka dari itu saat terjadi lonjakan tajam pada harga barang akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap GDP, hal ini merupakan teori resesi yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan sekaligus direktur dari tim pelaksana *World Bank* pada tahun 2010 hingga tahun 2016.(Elena, 2023)

b. Eddy Junaersin

Banyaknya kuantitas *money supply* akan berdampak pada eskalasi *demand*, jika hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan *supply* barang, maka akan terjadi *scarcity* atau biasa di sebut dengan kelangkaan pada stok barang sehingga membuat inflasi

naik secara perlahan, saat inflasi sudah berada di tahap yang cukup tinggi, maka yang dilakukan pemerintah menaikkan BI Rate dan pengurangan kuantitas *money supply* yang berujung pada resesi, hal itu merupakan teori yang diungkapkan oleh ekonom dari universitas perjuangan atau universitas pusat dari kebudayaan (UGM) yaitu Eddy Junaersin.(Grehenson, 2022)

c. Bhima Yudistira

Kontraksi pada perekonomian secara kurang lebih enam bulan atau dua kuartal secara berkesinambungan biasa disebut dengan resesi, hal ini merupakan teori yang dikemukakan oleh direktur dari suatu lembaga penelitian yang bertugas untuk menela'ah kondisi makro keuangan atau memiliki nama lain CELIOS bernama Bhima Yudistira. Bhima ialah salah satu peneliti di INDEF.(Natalia, 2022:1)

2. Pengertian Resesi

Saat terjadi kontraksi atau *minus* pada *income* suatu negara selama dua kuartal berturut-turut merupakan makna dari resesi, dalam hitungan ekonomi, satu kuartal memiliki jangka waktu selama tiga bulan, lambatnya pertumbuhan dalam dunia ekonomi merupakan gejala awal sebelum terjadinya resesi, namun saat perlambatan tersebut berlangsung lama maka harus diwaspadai akan terjadinya resesi hingga depresi dalam lingkup ekonomi. Menurut menteri yang bertugas di bidang moneter, APBN ialah salah satu instrumen untuk mengatasi

resesi, sebab sebelum terjadinya perlambatan *income* secara berkepanjangan, di sinilah peran APBN dibutuhkan, yaitu berupa suntikan anggaran untuk pemulihan variabel daya beli, namun saat APBN tidak dapat menjadi penangkal resesi, di situlah ancaman krisis global akan terjadi. (Rosana, 2022:1)

Kemerosotan moneter belum tentu dapat di sebut sebagai resesi, namun apabila kontraksi tersebut berjalan selama kurang lebih enam bulan dan didukung oleh faktor lain seperti tingginya inflasi, banyaknya kuantitas uang beredar, ekspor melemah namun impor meningkat, penurunan drastis pada nilai mata uang domestik, melemahnya lapangan pekerjaan (pengangguran tinggi), dan lain-lain dapat di sebut sebagai resesi, saat resesi telah tiba, maka tindakan yang harus diimplementasikan adalah *prepare* dana untuk kebutuhan darurat, tidak mengandalkan *active income* saja sebaiknya memiliki *passive income* (dapat berupa tabungan dalam rekening saham, membuat bisnis kost-kostan ataupun kontrakan). Selain itu hal yang dapat diimplementasikan saat terjadi resesi ialah memakai klaim asuransi, tidak menambah beban hutang ataupun *spending*, dan lain sebagainya.

Keadaan di mana terjadi kontraksi pada *Gross Domestic Product* yang berlangsung selama enam bulan atau dua kuartal beruntun dalam hitungan satu periode merupakan definisi dari resesi, jika negara telah masuk dalam kondisi resesi dan tidak segera dilakukan aktivitas rehabilitasi dan *recovery*, maka negara tersebut dapat terperosok ke

dalam titik depresi ekonomi yang jauh lebih berbahaya, depresi ini dapat berujung pada kebangkrutan dan keberlangsungan suatu negara akan dipertaruhkan. Terdapat beberapa indikator resesi yaitu: kontraksinya variabel daya beli atau biasa disebut sebagai konsumsi, turunya investasi, melemahnya kurs, tingginya pengangguran, kuantitas uang beredar di luar batas wajar, tingginya persentase inflasi, faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan membuat runtuhnya ekonomi dan berakibat kontraksinya *cash flow* negara.

Pada tahun 2020, telah terjadi kontraksi tajam pada seluruh aktifitas khususnya yang berhubungan dengan moneter di Indonesia, seperti pada sektor hotel, pusat perbelanjaan yang berpengaruh langsung pada konsumsi masyarakat, pariwisata, dan lain-lain, hal itu dipicu oleh dahsyatnya efek mekanikal yang ditimbulkan oleh virus yang berhasil memporak-porandakan perekonomian di seluruh dunia, virus tersebut telah menjadi pandemi akibat virus telah menyebar luas ke seluruh dunia (bukan hanya di Indonesia). Pada saat itu *cash flow* domestik dan internasional bernilai defisit, GDP domestik bernilai minus 5%, terjadi pula kekacauan pada lingkup produksi, hal ini sejalan dengan teori yang diutarakan oleh John Maynard atau biasa di sebut dengan istilah Teori Keynes, yaitu adanya kemacetan pada rantai alur sebuah produksi, penyaluran barang hingga konsumsi mulai mengalami kontraksi akibat *impact* dari virus, jika angka konsumsi telah mengalami kontraksi, maka dapat dipastikan, *income* domestik juga

mengalami penurunan drastis, hal itu di karenakan konsumsi memberikan kontribusi yang sangat besar pada *income* domestik, kurang lebih sebesar 58%, konsumsi merupakan sumbangsih terbesar terhadap *income* negara jika dibandingkan dengan bidang yang lain.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Keterkaitan teori para ahli mengenai resesi dengan judul dalam penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada kondisi perekonomian suatu negara yang berada dalam masa kontraksi selama enam bulan beturut-turut, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada strategi menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia khususnya pada tahun 2022.

3. Resesi di Indonesia

Ruang lingkup inflasi yang *hyper* jika tidak segera diatasi akan berakhir pada ancaman resesi, seperti contoh saat peredaran uang terlalu banyak sedangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan pasokan barang yang stabil, maka akan terjadi *scarcity* (kelangkaan) barang dan berakibat pada eskalasi harga, eskalasi tersebut akan meluas pada barang lain sehingga menjadikan inflasi berada pada titik yang tinggi, hal inilah yang disebut dengan *hyper* inflasi, kemudian pemerintah berusaha menarik kuantitas uang yang beredar secara perlahan menggunakan instrument eskalasi pada suku bunga dan lain sebagainya, hal ini tentunya menjadi sinyal bahwa dunia ekonomi berada dalam keadaan kurang baik, bukan hanya berimbas pada

peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, namun juga berdampak pada turunya *income*, saat *income* dari suatu negara tersebut mengalami kontraksi secara berkepanjangan dalam beberapa kuartal, maka dapat dipastikan negara tersebut telah terperosok ke dalam resesi.

Seperti yang dilalui Indonesia, tepatnya pada 2020, telah terjadi kontraksi tajam pada seluruh aktifitas yang berhubungan dengan moneter di Indonesia, hal itu dipicu oleh dahsyatnya efek mekanikal yang ditimbulkan oleh virus yang berhasil memporak-porandakan perekonomian di seluruh dunia. Pada saat itu *cash flow* domestik bernilai minus 5,32% pada kuartal 2, pembukuan defisit pada pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021, terjadi pula kekacauan pada lingkup produksi, hal ini sejalan dengan teori yang diutarakan oleh Keynes, terjadi kemacetan pada rantai alur sebuah produksi, penyaluran barang hingga konsumsi mulai mengalami penurunan akibat imbas dari virus, jika angka konsumsi telah mengalami kontraksi, maka dapat dipastikan, *income* domestik juga mengalami penurunan drastis, hal itu di karenakan konsumsi memberikan kontribusi yang sangat besar pada *income* domestik, kurang lebih sebesar 58%.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Terjadi pula eskalasi pada angka kemiskinan, PHK, yang berakhir pada pengangguran yang menjadikan *income* perorangan mengalami penyusutan secara perlahan, bukan hanya itu, kebijakan

untuk memutus aliran transmisi yang disebabkan virus, seperti pembatasan ruang gerak manusia sehingga terjadi *work from home* juga sangat mempengaruhi angka dari daya beli, maka dari itu *income* yang ada mengalami kontraksi tajam. (Fanani & Suselo, 2021:5)

Selain dari persentase inflasi yang terlalu tinggi, terdapat faktor lain penyebab resesi, yaitu adanya *panic selling* pada pasar saham maupun obligasi, investor panik akan adanya kontraksi harga pada asset yang dimiliki sehingga sebelum harga jatuh lebih mandalam maka terjadilah *panic selling* yang justru akan membuat angka dari kontribusi investasi itu sendiri mengalami penurunan drastis dan berujung pada penurunan keuangan negara.

Hutang yang terlalu menumpuk dapat menjadikan suatu negara mengalami keadaan resesi, baik hutang perorangan, komunitas, perusahaan atau bahkan negara itu sendiri, hutang jika tidak segera dilunasi akan memberi bunga yang memiliki nominal cukup besar yang berarti meningkatkan beban pembayaran, jika hal ini berlangsung secara terus menerus maka peluang resesi juga akan semakin terbuka.

Canggihnya robot selain membawa dampak positif yaitu membawa kemajuan pada suatu negara juga memiliki dampak yang cukup serius, sebab dengan adanya robot maka tenaga manusia akan digantikan secara perlahan dan pada akhirnya akan membuat eskalasi pengangguran, seperti contoh adanya CCTV akan menggantikan peran satpam yang bekerja, mesin di bank akan menggantikan teller pegawai

bank dan lain sebagainya, jika pengangguran meningkat maka GDP akan berpotensi melemah dan berujung pada resesi saat terjadi dalam waktu dua kuartal berkesinambungan.

Saat angka dari konsumsi dan produksi berada pada titik ketidakseimbangan maka akan memicu resesi, sebab dari ketidakseimbangan tersebut akan membuat pasokan barang di pasaran menjadi sedikit yang kemudian membuat harga akan melonjak tajam, faktor ini memiliki keterkaitan dengan persentase inflasi tinggi, namun sebaliknya saat produksi berlebihan tidak diimbangi dengan angka konsumsi yang tinggi, maka stok barang akan menumpuk dan membuat penurunan pada profit perusahaan. Saat profit mengalami kontraksi maka dunia investasi akan terancam sehingga menurunkan GDP dan berpotensi akan terjadi resesi.

2.1.3 Inflasi

1. Teori Inflasi

Ada banyak teori yang menjabarkan mengenai inflasi, secara umum terdapat 3 teori umum tentang inflasi yaitu Keynes, struktural dan juga kuantitas, namun perlu diketahui bahwa ketiganya bukan merupakan filosofi yang cukup lengkap untuk menjelaskan keadaan inflasi di kehidupan nyata maka dari itu akan dilengkapi penulis dengan teori lain mengenai inflasi, berikut merupakan filosofi tersebut, yang terdiri dari:

a. Teori Stukturalis

Jika dunia ekonomi mengalami kekacauan, seperti tidak adanya keseimbangan antara akumulasi pasokan barang di pasaran, tepatnya pada barang untuk keperluan pangan dan penurunan barang ekspor. Sehingga dapat dipastikan terjadi keterlambatan pada penambahan sisi *supply*, kegiatan produksi yang dilakukan tidak dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan penduduk dan menjadikan eskalasi harga pada sisa stok di pasaran dan meluas pada barang lain. (Ananda, 2020:15)

b. Teori Kuantitas

Berdasarkan teori ini disebutkan 3 macam asal mula eskalasi harga dan menjadi pemicu inflasi, yang pertama ialah problematika pada sirkulasi uang, hal ini biasa terjadi pada fenomena tingginya variabel daya beli atau konsumsi, selain itu terdapat pemicu lain yaitu kuantitas uang di suatu negara terlalu banyak, serta adanya kontraksi dalam suatu produksi. (Ramadhani, 2020:1)

c. Teori Keynes

Pemuas kebutuhan memiliki keterbatasan, namun sering kali dihadapkan pada keinginan kebutuhan yang tak terbatas, atau dengan kata lain terdapat keinginan untuk menikmati kehidupan di luar batasan kemampuannya, hal ini dapat di sebut sebagai sesuatu pemicu inflasi. Saat terjadi hal tersebut yang terjadi selanjutnya

yaitu pesatnya pertumbuhan angka *demand*, sehingga tidak tercapainya keseimbangan pada sisi *supply* dan tingkat *demand* dari masyarakat, jika hal ini tidak berlangsung dalam kurun waktu lama (sebentar) para ahli menyebutnya dengan fenomena inflasi secara jangka pendek. (Ananda, 2020:14)

d. Sadono Sukirno

Menurut tokoh ekonomi baik di lingkup mikro ataupun makro sekaligus penulis terkenal yang memiliki nama Sadono Sukirno penjabaran dari inflasi yaitu adanya eskalasi harga yang terjadi dalam beberapa barang yang dapat meluas pada barang yang lain, eskalasi ini bersifat lama (terus menerus), jika eskalasi terjadi pada sedikit barang saja maka hal ini bukan merupakan kejadian inflasi, namun jika eskalasi ini bersifat meluas namun tidak terjadi secara terus menerus maka tidak dapat pula disebut sebagai fenomena dari inflasi. (Safitri & Wahyuni, 2020:2)

e. Abdul Ghofur Anshori

Suatu kondisi di mana terdapat eskalasi harga yang bersifat umum (bukan hanya barang-barang tertentu saja) merupakan makna dari inflasi, inflasi sendiri dapat diatasi dengan strategi pemerintah yang bernama kebijakan moneter, strategi ini dioperasikan oleh Bank Indonsia yang bekerja sama dengan kementerian di lingkup moneter yang merupakan bagian dari pemerintah, menurut Ghofur terdapat strategi lain yang bertujuan

untuk mengendalikan inflasi yaitu strategi fiskal dan juga strategi non moneter. Kebijakan di lingkup moneter dan fiskal memiliki perbedaan dalam target yang menjadi sasaran kebijakan, jika fiskal lebih berfokus pada strategi yang memiliki korelasi dengan *financial* pemerintah (berupa *income* dan *spending*), sedangkan moneter memiliki wewenang untuk mengatur *income* secara nasional melalui kuantitas uang yang sedang beredar, *interest rate*, dan lain-lain, hal ini diungkapkan oleh Abdul Ghofur Anshori selaku pengarang sekaligus dosen UGM.(Safitri & Aria, 2022:3)

f. Milton Friedman

Inflasi ialah suatu fenomena yang mengakibatkan harga akan mengalami eskalasi secara terus menerus, eskalasi ini bersifat umum dan terjadi pada banyak barang bukan hanya beberapa barang saja, beberapa faktor penyebab inflasi yaitu ekspansi di lingkup moneter, seperti contoh saat pemerintah menyuntikkan kuantitas moneter lebih banyak dari sebelumnya hingga melebihi batas wajar kuantitas peredaran uang, menurut ekonom moneter yang terkenal ini terdapat faktor lain pemicu adanya inflasi yaitu adanya akselerasi dalam *velocity money*, adanya perkembangan dalam *income* yang bersifat *real* juga turut mempengaruhi tingginya persentase inflasi suatu negara, tiga faktor tersebut akan selalu memiliki korelasi erat dengan inflasi sehingga menjadikan inflasi akan selalu ada yang tentunya diikuti oleh faktor moneter

lainnya, hal ini merupakan teori inflasi yang diutarakan oleh ekonom terkenal di bidang moneter yang memiliki nama Milton Friedman, selain menjadi ekonom berkebangsaan Amerika Friedman juga merupakan intelektual di lingkup publik.(Priyono & Ismail, 2012:86)

2. Pengertian Inflasi

Yang di maksud dengan inflasi ialah suatu eskalasi harga secara berkesinambungan dan juga memiliki sifat meluas, eskalasi harga tersebut bukan terjadi pada satu atau beberapa barang, melainkan banyak barang, biasanya gejala inflasi tinggi dipicu oleh eskalasi harga pada BBM, saat mengalami peningkatan, maka seluruh komoditi yang diperjual belikan juga akan mengalami eskalasi pada harganya seperti harga makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Lawan kata dari inflasi ialah deflasi yang memiliki makna turunya harga barang yang bersifat umum, meluas dan berkesinambungan, adapun cara mengatasi dua keadaan tersebut berbeda, jika inflasi tinggi maka kebijakan yang diimplementasikan bersifat kontraktif yaitu menarik kuantitas uang beredar yang terlalu banyak, namun sebaliknya saat terjadi deflasi maka kebijakan yang diimplementasikan bersifat ekspansif yaitu menambah kuantitas uang yang dipegang masyarakat. Selain untuk menambah kuantitas uang beredar, kebijakan ekspansif juga dapat berfungsi sebagai cara untuk menurunkan jumlah dari angka pengangguran, kebijakan ekonomi ekspansif juga dapat merangsang daya beli masyarakat saat

terjadi krisis ekonomi seperti kontraksi, resesi, atau bahkan depresi ekonomi suatu negara, yang pada selanjutnya akan terjadi eskalasi pada mobilitas kegiatan atau aktifitas dari bisnis belanja oleh konsumen (masyarakat). Di karenakan dalam kebijakan moneter ekspansif ini akan menambah kuantitas uang beredar, maka yang terjadi selanjutnya adalah adanya ancaman inflasi yang tinggi, di saat pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah harus menyiapkan otak extra untuk behati-hati, sebab kuantitas uang beredar di masyarakat dapat memberi efek positif seperti eskalasi angka konsumsi masyarakat yang pada dasarnya konsumsi itu sendiri akan memberi kontribusi pada angka dari product domestic bruto sebesar enam puluh persen, namun di lain sisi, jika inflasi terus meningkat maka yang terjadi selanjutnya bagaikan bom waktu bagi negara itu sendiri, terjadilah *hyper* inflasi di mana pada titik itu, inflasi sudah tidak lagi terkendali, harga barang-barang akan naik dengan begitu drastis namun mata uang dari suatu negara tersebut juga mengalami penurunan yang sangat drastis pula, *hyper* inflasi terjadi saat angka akumulasi tahunan inflasi melebihi persentase tertentu.

Indonesia pernah mengalami *hyper* inflasi pada masa awal kemerdekaan, pada saat itu terjadilah implementasi *blockade* belanda pada aktifitas perdagangan sebesar seratus persen. inflasi tersebut dapat membunuh, membahayakan bahkan menenyapkan suatu negara, jadi di saat seperti ini pemerintah harus benar-benar memperhatikan keadaan

inflasi terupdate agar tidak sampai salah dalam implemmentasi kebijakan.

Inflasi sendiri digunakan oleh pihak pemerintah sebagai tolok ukur stabilisasi ekonomi, saat roda perekonomian berjalan dengan baik, maka inflasi suatu negara berada dalam range 2 hingga 4% dalam hitungan tahun, namun sebaliknya saat dunia ekonomi sedang mengalami kekacauan, seperti saat terjadi instabilitas pasokan barang dengan angka *demand*, kuantitas uang yang dipegang masyarakat terlalu banyak, hal itu akan membuat eskalasi tajam dari suatu harga barang yang tentunya akan membuat tingginya angka inflasi itu sendiri, maka dari itu perlu diperhatikan tingkat inflasi yang sedang terjadi sebab *impact* yang dihasilkan sangat mempengaruhi *income* negara dan kemakmuran rakyat.

Inflasi yang dinilai terlalu tinggi dapat menjadi bahaya bagi keberlangsungan suatu negara, sebab dengan tingginya inflasi maka akan berdampak pada nilai kurs yang berujung pada total hutang di luar negeri akan membengkak dan penurunan investasi, jika investasi mengalami kontraksi maka GDP juga akan mengalami probabilitas kontraksi sebab komponen penyusun GDP selain konsumsi yang dilambangkan dengan huruf C, pengeluaran pemerintah yang di beri simbol G, ekspor dan impor, terdapat komponen penting lain dalam akumulasi GDP yaitu angka investasi yang dilambangkan dengan I, perlu diketahui bahwa investasi dapat menjadi media ekspansi suatu

perusahaan yang dapat memberikan dampak tersedianya lapangan pekerjaan sehingga terjadi kontraksi pada angka pengangguran, selain itu *impact negative* dari inflasi tinggi dapat membuat kontraksi pada *income* masyarakat, turunya standar hidup, eskalasi pada angka kemiskinan dan pengangguran, terdapat dampak yang sangat fatal akibat melonjaknya inflasi yaitu terjadi kontraksi secara drastis pada variabel daya beli, yang berujung pada kemerosotan ekonomi.(Tysara, 2022:1)

Eskalasi harga bersifat meluas, umum, serta berkesinambungan biasa disebut dengan inflasi, jika eskalasi hanya pada beberapa barang dan tidak bersifat meluas maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai inflasi, inflasi dapat diukur melalui suatu indeks yang bernama IHK, IHK merupakan suatu indeks yang berisi tentang ukuran suatu harga rata-rata baik di bidang jasa maupun barang yang di gunakan oleh masyarakat, selain sebagai parameter inflasi IHK dapat digunakan untuk mengambil keputusan insentif untuk karyawan (dalam hal ini berupa gaji ataupun upah), suatu perjanjian dua pihak ataupun lebih tentang suatu hal yang telah mendapat persetujuan dan kesepakatan mereka atau biasa di sebut dengan istilah kontrak. Inflasi terbagi menjadi beberapa macam, jika dilihat dari aspek penyebab, terdapat tiga jenis inflasi yaitu:

- a. *Demand pull inflation* (eskalasi harga yang disebabkan oleh faktor dari eskalasi angka *demand*, saat jumlah *demand* tidak berada pada

titik keseimbangan dengan jumlah pasokan barang atau *supply* maka harga suatu barang akan melonjak tajam akibat adanya *scarcity* atau biasa di sebut dengan kelangkaan).

- b. *Cosh push inflation* (eskalasi harga yang disebabkan oleh faktor eskalasi biaya produksi, seperti contoh saat harga bahan bakar minyak mengalami eskalasi maka hal itu akan berdampak pada eskalasi biaya pada proses pembuatan produksi itu sendiri atau dalam kata lain biaya untuk memproduksi, selain itu terdapat contoh lain seperti tingginya gaji *labour* perusahaan yang tidak seimbang dengan kualitas dari hasil produksi, hal ini tentunya akan merugikan beberapa *stakeholder*).
- c. *Bottle neck inflation* (eskalasi harga yang disebabkan oleh faktor *demand* dan *supply*, faktor ini merupakan gabungan dari kedua faktor di atas, yaitu *cosh push inflation* dan *demand push inflation*).

Ketiga jenis inflasi di atas memiliki tingkatan yang berbeda-beda jika dilihat dari aspek penyebabnya, namun jika dari aspek jenis, inflasi terbagi menjadi 4 macam (Fatimah, 2022) yaitu:

- a. Inflasi ringan apabila *range* inflasi berkisar di bawah 10% dalam hitungan satu periode, inflasi yang baik berada dalam *range* 4% pada hitungan satu periode.
- b. Inflasi sedang apabila *range* inflasi berkisar antara 10 hingga 30% dalam hitungan satu periode, inflasi sedang masih tergolong dalam

titik aman namun perlu di waspadai akan probabilitas eskalasi inflasi yang lebih lanjut.

- c. Inflasi berat apabila *range* inflasi berkisar antara 30 hingga 100% dalam hitungan satu periode, apabila suatu negara berada dalam titik inflasi berat maka pemerintah yang berkaitan harus sangat waspada dalam mengambil kebijakan sebab di titik inilah menjadi penentu inflasi tersebut tetap berada dalam tren eskalasi yang berujung *hyper* inflasi dan membuat *collapsnya* suatu negara atau justru strategi yang diimplementasikan dapat membawa negara ke dalam masa rehabilitasi dan *recovery*.
- d. *Hyper* inflasi apabila *range* inflasi berkisar di atas 100% dalam hitungan satu periode, bergerak liar dan eskalasi harga tidak dapat dikendalikan, dalam fase ini suatu negara rawan mengalami kebangkrutan ditandai dengan turunnya nilai uang secara drastis yang berujung pada hutang yang semakin tinggi, penurunan tabungan dan investasi yang sangat signifikan sehingga menjadikan negara tersebut masuk dalam depresi ekonomi, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari penggolongannya, inflasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Inflasi lokal atau domestik merupakan inflasi yang terjadi akibat faktor dari dalam negeri seperti adanya kuantitas peredaran uang

yang berlebihan sehingga menjadikan peluang naiknya persentase inflasi, inflasi lokal memiliki nama lain sebagai *domestic inflation*.

- b. Inflasi lingkup internasional ialah inflasi yang diakibatkan oleh guncangan ekonomi dunia, hal ini dapat berupa instabilitas inflasi negara lain khususnya tingginya persentase inflasi AS, seperti contoh saat *Federal Reserve* menyuntikkan terlalu banyak bantuan sehingga *supply* dollar menjadi meningkat tajam yang pada akhirnya FED akan membuat kebijakan kontraktif dengan menaikkan suku bunga secara drastis, hal ini tentunya akan membawa inflasi di negara *emerging market* akan mengalami eskalasi juga secara perlahan, contoh lain saat pelemahan kurs rupiah jika dibandingkan dengan dollar AS juga akan memperparah persentase inflasi menjadi jauh lebih tinggi (terjadilah *imported inflation*), perlu diketahui bahwa mata uang dengan inflasi negara yang berkaitan memiliki korelasi sangat erat.

Keterkaitan teori para ahli mengenai inflasi dengan judul penelitian ini terletak pada volatilitas eskalasi harga barang-barang dalam satu periode di suatu negara, kondisi tersebut biasa dinamakan sebagai inflasi, inflasi memiliki korelasi erat dengan kuantitas uang beredar, *interest rate* dan lain sebagainya, faktor lain yang mempengaruhi instabilitas inflasi yaitu tingkat *demand* masyarakat, stok barang di pasar yang berujung pada *income* suatu negara, *income*

tersebut dapat bernilai surplus ataupun defisit dalam beberapa kuartal di satu periode.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul:	Persamaan dan Perbedaan Penelitian:	Hasil Penelitian:
1.	<p>Judul : Inflasi, Tingkat Pengangguran Dan Daya Beli Masyarakat Di Kabupaten Bogor (2020)</p> <p>Peneliti : Nanda Hidayati, Muh Ali Maskuri</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini membahas inflasi yang dapat berujung pada kondisi resesi. Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada perubahan daya beli yang disebabkan oleh faktor pengangguran dan inflasi, sedangkan penelitian saat ini fokus pada pengendalian inflasi untuk menghindari ancaman resesi.</p>	<p>Adanya korelasi erat antara inflasi dengan banyaknya pengangguran terhadap volatilitas daya beli, jika daya beli mulai terpengaruh maka akan terjadi perubahan pada jumlah <i>gross domestic product</i> suatu negara, jika GDP tersebut mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut dalam hitungan tahun yang sama, maka negara tersebut masuk dalam jurang resesi.</p>
2.	<p>Judul : Hubungan Tingkat Suku Bunga Dengan Inflasi Dikala Resesi Dan Usaha Dalam Pemulihan Kesehatan Ekonomi (2022)</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini membahas mengenai inflasi di kala resesi. Perbedaan penelitian terdahulu</p>	<p>tingkat suku bunga dengan inflasi mempunyai hubungan saling mempengaruhi terutama di kala resesi, serta terdapat beberapa strategi dalam pemulihan <i>pasca</i> pandemi</p>

	<p><u>Peneliti :</u></p> <p>Mirna Shofa Hesti, Mohammad Ikhsan, Muhammad Rudy Alamsyah, Syahrul Munir</p>	<p>membahas beberapa usaha pemulihan ekonomi, sedangkan penelitian yang sekarang tentang kebijakan moneter dengan pengendalian inflasi.</p>	<p>(menggerakkan kembali roda ekonomi) salah satunya melalui pengendalian inflasi menggunakan kebijakan tingkat suku bunga yang ada di suatu negara.</p>
3.	<p><u>Judul :</u></p> <p>Pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia pada masa pandemi (2021)</p> <p><u>Peneliti :</u></p> <p>Eka Purnama Sari, Fadia Salsabila Rahmawan, Nurul Jannah</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai inflasi, pertumbuhan suatu negara menjadi objek dalam penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan tentang pembagian sektor dalam kontribusi ekonomi, penelitian saat ini fokus dalam cara mengendalikan inflasi untuk mengatasi ancaman resesi.</p>	<p>Terjadi inflasi kurang lebih 3% di Maret 2020, bukan hanya itu, namun telah terjadi eskalasi harga emas dan pangan, tingginya <i>cash flow</i> Indonesia saat itu dipicu oleh beberapa sektor dengan persentase kontribusi yang berbeda-beda.</p>
4.	<p><u>Judul :</u></p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan</p>	<p>Suku bunga yang ditetapkan oleh BI dan</p>

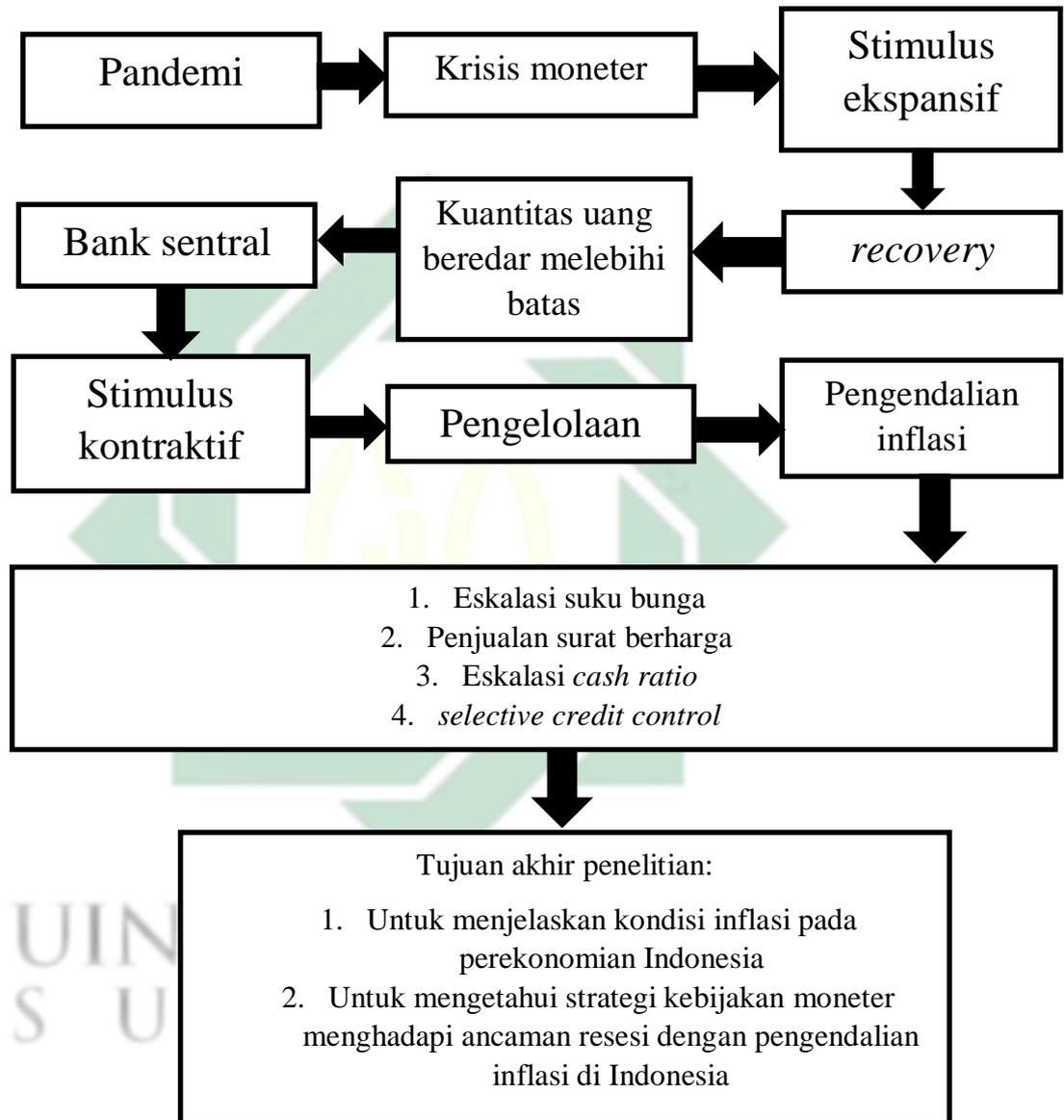
	<p>Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi (2020)</p> <p><u>Peneliti :</u> Andi Riski Ananda AP</p>	<p>penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengendalian inflasi. Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan tentang cara untuk menstabilkan perekonomian, sedangkan penelitian saat ini fokus pada strategi untuk menghadapi ancaman resesi.</p>	<p>juga sertifikat yang diterbitkan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilisasi dalam lingkup ekonomi.</p>
5.	<p><u>Judul :</u> Analisis Determinasi Inflasi di Indonesia (2018)</p> <p><u>Peneliti :</u> Ari Mulianta Ginting</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas inflasi sebagai objek dalam penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus pada variabel penyebab volatilitas inflasi, sedangkan penelitian saat ini fokus pada strategi pengendalian inflasi dan strategi</p>	<p>Inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai tukar, uang beredar dan tingkat konsumsi, variabel GDP memiliki pengaruh negative pada inflasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas inflasi sebagai objek dalam penelitian.</p>

		menghadapi ancaman resesi.	
6.	<p>Judul : Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia (2021)</p> <p>Peneliti : Ina Heliany</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai resesi. Perbedaan penelitian terdahulu yakni mengkaji peran kebijakan fiskal, penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengkaji tentang peran kebijakan moneter.</p>	<p>Dalam upaya menekan resesi, pemerintah mewujudkannya melalui berbagai kebijakan salah satunya di bidang fiskal. Bukan hanya itu, program yang diimplementasikan juga berfungsi sebagai trik menjaga stabilisasi ekonomi, mengurangi angka indeks gini, menjauhkan dari korupsi, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Judul : Strategi Menghindari Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi (2020)</p> <p>Peneliti : Selena Blandina, Alvin Noor Fitrian, Wulan Septiyani</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai strategi menghadapi ancaman resesi. Perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang strategi umum yang dilakukan untuk menghindari ancaman resesi, penelitian</p>	<p>Kebijakan yang diimplementasikan, baik lingkup moneter ataupun fiskal dapat menjauhkan suatu negara dari resesi, bukan hanya itu terdapat faktor lain seperti tingginya tingkat produktivitas yang diimbangi dengan eskalasi <i>demand</i>, positifnya <i>cash</i></p>

		yang dilakukan peneliti sekarang fokus menekuni pada kebijakan moneter pengendalian inflasi.	<i>flow</i> dunia, dan eskalasi dalam daya saing.
8.	<p>Judul : Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19 (2021)</p> <p>Peneliti : Alvin Baharudin Vanani, Dedi Suselo</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai resesi. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai resesi yang dialami Indonesia, penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengkaji strategi kebijakan moneter dalam menghadapi ancaman resesi</p>	<p>Angka perekonomian dapat menjadi tolok ukur dari sebuah kemajuan, yang menjadi parameter perkembangan Indonesia adalah akumulasi GDP, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi resesi tepatnya di tahun 2020 pada kuartal 2, yang disebabkan defisit pada angka <i>Gross Domestic Product</i>.</p>
9.	<p>Judul : Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia</p> <p>Peneliti :</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai pandemi. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai pandemi dan pertumbuhan</p>	<p>Pandemi covid 19 terjadi di Indonesia dan menjadikan Indonesia masuk kedala resesi pada kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021 puji syukur tuhan pada kuartal 2 2021 Indonesia telah keluar dari titik resesi dan</p>

	<p>Khairul Akbar, Emmia Tembarta Kambaren, Ade Firmansyah Tanjung (2020)</p>	<p>ekonomi pada tahun 2021 yang dialami Indonesia penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengkaji strategi kebijakan moneter dalam menghadapi ancaman resesi</p>	<p>membukukan surplus pada pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% dalam hitungan c on c yang terus berlanjut mengalami eskalasi hingga tahun 2022.</p>
10.	<p>Judul : Transmisi BI Rate sebagai Instrumen Untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter (2018) Peneliti : Suparman Zen Kemu, Syahrir Ika</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas mengenai instrument BI Rate. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai konsep BI Rate dan inflasi yang dialami Indonesia, penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengkaji strategi kebijakan moneter dalam menghadapi ancaman resesi</p>	<p>Kebijakan BI rate adalah proses panjang untuk mewujudkan terkontrolnya tingkat inflasi suatu negara, selain itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (antara surplus dan defisit), kesempatan kerja dan keseimbangan pembayaran..</p>

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

Pada penelitian ini peneliti mengambil problematika mengenai strategi kebijakan moneter untuk menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi. Saat terjadi pandemi, daya beli mengalami kontraksi tajam sehingga membuat *cash flow* negara menjadi *minus* atau defisit, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menggelontorkan stimulus besar-besaran (ekspansif) sebagai upaya *recovery* dengan harapan daya beli akan mengalami eskalasi sehingga GDP dapat mencapai target yang diinginkan.

Stimulus ekspansif tersebut dinilai para ahli telah tepat sasaran yang ditandai dengan surplusnya *cash flow* negara secara perlahan, namun seiring berjalanya waktu dampak negatif mulai terlihat akibat digelontorkannya stimulus besar-besaran tersebut mengakibatkan kuantitas uang beredar melebihi batas wajar, hal itu digambarkan oleh tingkat inflasi dengan range tinggi, maka bank sentral dan kementerian mengatasinya menggunakan stimulus kontraktif khususnya di lingkup moneter melalui eskalasi instrumen suku bunga, penjualan *commercial paper*, pengurangan kuantitas uang beredar, eskalasi *cash ratio* untuk mengendalikan inflasi dan menghadapi ancaman resesi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif, disebut sebagai penelitian kualitatif sebab penelitian yang dilakukan oleh penulis akan memberikan proyeksi tentang kejadian di masa depan melalui gejala yang ada saat ini, penulis melakukan analisis pada volatilitas informasi inflasi di Indonesia melalui laporan dari pihak terkait seperti badan pusat statistik, bank sentral Indonesia, dan strategi kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi, informasi dalam skripsi penelitian ini akan disajikan penulis dengan bentuk narasi yang akan membongkar jawaban problematika dalam penelitian dan telah dikaitkan dengan teori dalam ilmu ekonomi.

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian

Peneliti berdomisili di Surabaya melakukan penelitian mengenai inflasi makro yang terjadi di Negara Indonesia dalam hitungan *year on year* selama tahun 2019-2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Segala fakta yang memiliki korelasi dengan judul merupakan sumber informasi yang telah disesuaikan pada ilmu ekonomi dan berpacu pada visi dalam penelitian, informasi yang dikumpulkan penulis digunakan

untuk menjawab problematika dalam penelitian ini dan memiliki korelasi erat dengan volatilitas inflasi, *income* negara serta kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi khususnya pada tahun 2022.

3.3.2 Sumber Data

Sumber dari informasi penelitian ini yaitu segala informasi yang dianggap penulis memiliki hubungan korelasi dengan judul dalam penelitian yang akan diteliti, informasi yang diambil telah disesuaikan dengan ilmu ekonomi dan memiliki titik fokus pada visi penelitian, berikut merupakan sumber informasi pada penelitian ini.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah informasi dengan sifat sekunder, yaitu informasi diperoleh dari pihak ketiga, peneliti tidak turun secara langsung demi memperoleh informasi, tetapi melalui perantara yaitu informasi yang terdapat pada studi kepustakaan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, informasi yang diperoleh penulis juga berasal dari jurnal, thesis karya mahasiswa, *report*, penelitian terdahulu, dan *network* yang memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Implementasi suatu ilmu yang diimbangi dengan kemajuan iptek guna menanggulangi problematika yang ada merupakan penjabaran dari teknik dalam mengumpulkan informasi di penelitian ini, hal ini biasa disebut sebagai data *collection* seperti adanya proses melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan cara pengumpulan informasi secara nyata, masing-masing cara pengumpulan informasi dijabarkan mengenai definisi dan

implementasinya di kehidupan nyata untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, berikut merupakan teknik dalam data *collection* yaitu berupa dokumentasi.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang berasal dari catatan, karya, jurnal ataupun gambar penting, namun dokumentasi ini dapat juga berasal dari perorangan, organisasi ataupun lembaga tertentu, seperti informasi yang tercantum dalam BPS. Informasi dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pengetahuan penelitian. (Sugiyono, 2017:128)

Dokumen dalam penelitian kualitatif yaitu bahan tertulis, sinema, ataupun gambar hidup (biasa disebut sebagai *movie*) yang digunakan sebagai media pendukung indikasi dalam penelitian penulis. Suatu penelitian yang memakai sumber informasi dokumentasi dimaksudkan untuk memperbanyak dan memperkuat indikasi dan isyarat dalam rangka memberikan jawaban atas problematika dalam penelitian yang bersifat akurat, hal ini disebabkan dari dokumen tersebut akan diperoleh rincian jawaban yang cukup spesifik dalam mendukung informasi dari sumber-sumber lain dan tentunya memiliki korelasi erat dengan judul penelitian. (Sugiyono, 2017)

3.5 Teknik Analisis Data

Upaya melakukan penjabaran dan menela'ah pada rentetan informasi yang dianggap memiliki korelasi dengan jawaban dalam problematika penelitian, lalu informasi tersebut disusun ke dalam argumen,

tipe dan juga entitas penjabaran secara *basic* merupakan penjelasan dari analisis informasi. Pengertian informasi sendiri ialah pencarian korelasi yang terdapat dalam dimensi-dimensi penjabaran.(Azwardi, 2018).

Skema analisis informasi yang dilakukan peneliti merupakan acuan versi Miles dan juga Huberman, meliputi:(Hariyanti, 2018)

3.5.1 *Data Reduction*

Miles dan Huberman menjelaskan jika reduksi data diartikan sebagaimana proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi informasi yang timbul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3.6.2 *Data Display*

Penyajian informasi berdasarkan argumen Miles dan Huberman ialah gabungan serta keputusan tindakan. Fungsi dari data *display* ini sebagai rancangan dalam mengintegrasikan informasi, sehingga dapat terbentuk pola yang padat.

3.6.3 *Conclusion Drawing*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan merupakan bagian kesimpulan terhadap informasi-informasi penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan penemuan baru yang lebih dahulu belum pernah ada. Penemuan tersebut bisa berbentuk deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.(Hariyanti, 2018)

Informasi yang diperoleh peneliti akan diuraikan secara detail pada tiap elemen hingga menjadi kesatuan utuh dalam memberikan informasi jawaban akurat untuk menjawab problematika dalam penelitian, bukan hanya itu tujuan dari analisis informasi ini juga digunakan untuk menela'ah, menilai problematika, peluang dan rintangan yang ada serta hal apa saja yang dibutuhkan dalam masa pengontrolan inflasi dan menghadapi resesi seperti yang dialami Indonesia pada tahun 2020 khususnya pada pertengahan kuartal dalam periode tersebut, telah terjadi kontraksi pada pertumbuhan di lingkup moneter selama 2 kuartal lebih, yaitu -5,32% di kuartal 2, pada kuartal selanjutnya terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang defisit, yaitu -3,49%, kemudian pada kuartal 4 2020 pertumbuhan ekonomi masih membukukan minus yaitu sebesar -2,19%, dan titik resesi di akhiri pada kuartal 1 2021 yaitu sebesar -0,74%, puji syukur tuhan pada 2021 kuartal 2 Indonesia mampu keluar dari resesi dan membukukan surplus 7,07%. Hal itu dibuktikan oleh informasi yang terdapat dalam badan pusat statistik dan diperkuat oleh fenomena lain yaitu adanya kontraksi tajam pada daya beli masyarakat, penyusutan angka ekspor, eskalasi dalam akumulasi pengangguran, kontraksi lapangan kerja hingga tercapai titik *recovery* dan rehabilitasi dalam lingkup moneter. (Finaka, 2022)

Cara analisis yang digunakan penulis untuk menyusun proposal skripsi ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu menela'ah dan menjabarkan menggunakan kata-kata pada setiap informasi yang memiliki korelasi dengan judul dalam penelitian ini.

3.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengandung deskripsi dalam bentuk tulisan untuk memberikan proyeksi isi proposal sesuai dengan urutan bab yang ada, dalam hal ini sistematika penulisan proposal ini mengarah pada alur pengendalian inflasi untuk menghadapi ancaman resesi. Berikut merupakan tahapan dalam penulisan proposal skripsi:

Bab 1 Pendahuluan, menjabarkan mengenai latar belakang dalam problematika penelitian, identifikasi dan batasan problematika, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan diadakannya penelitian ini baik dalam segi pola pikir maupun praktik agar dapat dimengerti oleh pembaca.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang pendapat beberapa pakar di bidang ekonomi untuk menjabarkan suatu keadaan tertentu dan digunakan untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Pembahasan pada bab II lebih menekankan pada penjabaran definisi inti pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang penjabaran penelitian yang dilakukan peneliti, tempat dan lokasi yang menjadi objek penelitian, jenis dan sumber informasi yang diperoleh, cara memperoleh informasi yang memiliki korelasi dengan judul penelitian, cara analisis informasi dan sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Indonesia

Indonesia merupakan suatu pemerintahan di bagian Barat Laut dari Benua Asia dan bagian Tenggara dari Benua Australia, hal ini merupakan penjelasan secara fisik bumi yang biasa disebut sebagai istilah geografis dari keberadaan Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang absolut (garis *latitude* dan meredien) letak pemerintahan ini berada pada titik koordinat 6° Paralel Utara dan 11° Pada Paralel Selatan, perlu diketahui bahwasanya letak absolut merupakan keberadaan suatu wilayah jika dilihat dari garis *latitude* ataupun meredien, garis *latitude* biasa disebut sebagai paralel. Negara dengan sebutan *The Emerald of Equator* ini terletak pada titik koordinat 95° - 141° Meredien Timur. Jika dilihat dari sudut pandang bentangan air di laut, maka negara ini berada antara Samudra nomor tiga terluas di dunia yaitu Hindia dan Lautan Teduh atau memiliki nama lain Pasifik. (Suciati dkk., 2022)

Selain memiliki sebutan sebagai *The Emerald of Equator*, Nusantara ini juga memiliki nama lain sebagai Insulinde yang memiliki makna Pulau Hindia, hal ini dikarenakan letak geografis berdasarkan fakta yang ada, istilah kepulauan diberikan sebab Nusantara ini merupakan gabungan dari banyak pulau, nusantara ini masuk dalam kategori nomor enam terbesar dalam kepemilikan pulau di dunia, maka

dari itu tidak heran apabila bentangan air di Indonesia memiliki cakupan yang cukup luas, kurang lebih tiga juta dalam satuan kilometer persegi. Selain itu Nusantara ini terletak pada batas ekuator, ekuator ialah sebuah batas yang berupa garis dan berada pada sentral planet, lebih tepatnya antara *latitude* dan dua planet, adanya ekuator ini menyebabkan pembagian belahan planet bumi, sehingga terciptalah bagian utara dan juga selatan. Selain mendapat peringkat nomor enam pada kepemilikan pulau, insulinde ini juga mendapatkan rangking lima belas sebagai pemerintahan yang memiliki area kedaulatan cukup luas dalam skala internasional. Terdapat beberapa sebutan lain yang ditujukan pada insulinde ini, seperti memperoleh sebutan Seribu Pulau, Macan Asia yang Tidur, Seribu Kuil, Heaven of Earth, selain itu terdapat sebutan unik lain yaitu Megabiodiversitas yang memiliki makna diversifikasi hayati atau memiliki nama lain biodiversitas sangat kaya di lingkup internasional. (Utami, 2023)

Insulinde ini berbatasan tanah dengan Negeri Jiran, juga berbatasan dengan Guinea baru yang merupakan nama lain dari Papua Nugini, dan RDTL atau memiliki kepanjangan dari Republik Demokratik Timor-Leste (dalam lingkup internasional), sedangkan jika dilihat dari persepsi lautan, maka insulide ini memiliki garis pemisah laut Negara Merlion, Siam, Hindustan, Bumi Loro Sae, Guinea baru, Negeri Kanguru, Palau dan lain-lain. Insulinde ini memiliki garis pesisir yang cukup panjang nomor dua dalam parameter internasional, untuk pemilik garis terpanjang

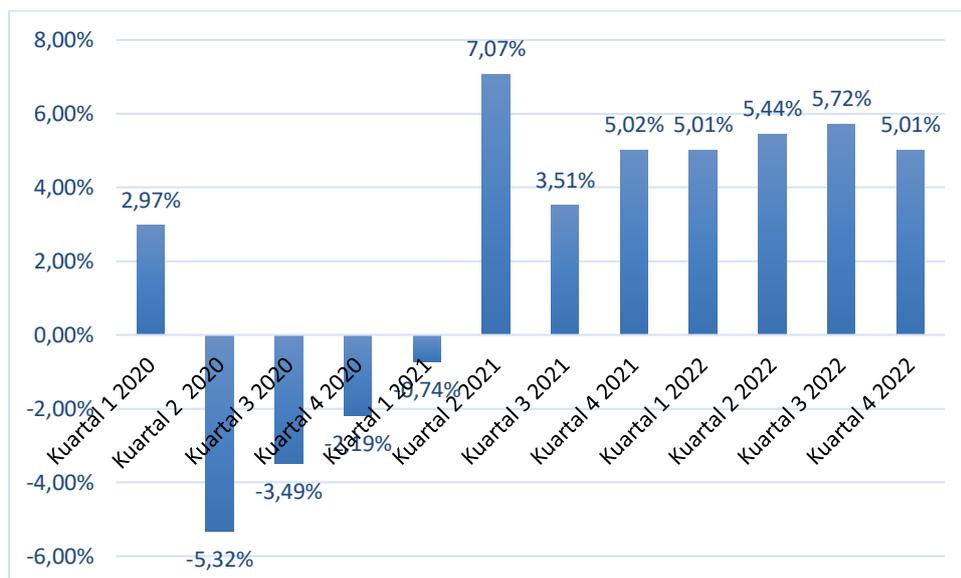
pada pesisir di dunia adalah Dominion of Canada yang berada pada kawasan utara di Anglo Amerika.(Hadi Kusuma, 2023)

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Maret tahun 2023, peneliti melakukan penelitian pada kondisi inflasi di Nusantara yang bergerak cukup volatil mulai dari hitungan tahun 2019 (pra pandemi) hingga tahun 2022 (pandemi berakhir dan memunculkan sebuah problematika moneter yang cukup kompleks), bukan hanya itu peneliti juga melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi yang dilakukan oleh pihak bank sentral terkait pengendalian tatanan moneter Indonesia, khususnya strategi yang memiliki target dalam stabilisasi moneter guna mengadakan pencegahan pada probabilitas resesi di periode selanjutnya melalui instrumen pengendalian persentase inflasi, dalam hal ini peneliti lebih fokus pada strategi di bidang moneter yang di pertanggungjawabkan dan diimplementasikan oleh Bank Sentral, hal ini tertuang dalam Undang-Undang pada nomor 23, tepatnya Tahun 1999.(Utami, 2021)

4.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berikut merupakan informasi yang diperoleh mengenai kondisi moneter Indonesia atau biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung berdasarkan tiap kuartal dalam satu periode:



Gambar 4. 1 Pertumbuhan Keuangan Indonesia (C to C)

Sumber: Badan Pusat Statistik (Tahun 2020–2022)

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dijabarkan bahwasanya kondisi moneter Indonesia pada tahun 2020 kuartal 2 hingga kuartal 1 pada tahun 2021 mengalami kontraksi selama 4 kuartal, pada kuartal 2 2020 terjadi defisit sebesar -5,32%, pada kuartal selanjutnya tahun 2020 terjadi lagi pertumbuhan moneter yang defisit, yaitu -3,49%, kemudian pada kuartal 4 2020 pertumbuhan moneter masih membukukan minus yaitu sebesar -2,19%, dan titik resesi di akhiri pada kuartal 1 2021 yaitu sebesar -0,74%, puji syukur tuhan pada 2021 kuartal 2 Indonesia mampu keluar dari resesi dan membukukan surplus 7,07%. Hal itu dibuktikan oleh informasi yang terdapat dalam badan pusat statistik dan diperkuat oleh fenomena lain yaitu adanya kontraksi tajam pada daya beli masyarakat, penyusutan angka ekspor, eskalasi dalam akumulasi pengangguran, kontraksi lapangan kerja

hingga tercapai titik *recovery* dan rehabilitasi dalam lingkup moneter.(Finaka, 2022)

Informasi diatas merupakan informasi yang tecantum dalam badan pusat statistik atau biasa disebut dengan istilah BPS, kemudian dianalisis mendalam oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif dan berpacu pada kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab dua sebagaimana kerangka tersebut menjadi tumpuan logis dalam sebuah penelitian.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kondisi Inflasi Pada Perekonomian Indonesia

Kondisi moneter Indonesia cukup stabil pada tahun 2019, hal ini dibuktikan oleh persentase inflasi (dihitung berdasarkan tiap periode menggunakan acuan IHK) yang berada pada angka 2,72%, inflasi yang baik berada pada range 2 hingga 4% dalam hitungan *year on year*, hal ini berlaku bagi negara maju ataupun *emerging market* seperti Indonesia, *emerging market* memiliki makna sebagai negara berkembang (bertumbuh). Pada tahun 2023, *The Federal Reserve* biasa disebut sebagai *the FED* sangat mengupayakan agar inflasi negeri paman sam tersebut berada pada range 2%, hal ini disebabkan range 2 hingga 4% merupakan persentase inflasi yang cukup baik dan sehat untuk suatu negara. Saat itu juga pertumbuhan moneter Nusantara berada pada angka 5,02% yang berarti surplus dan merupakan proyeksi bahwa kondisi moneter masih tergolong tumbuh di tengah uncertainty skala global.(Bank Indonesia, 2022)

Namun hal itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2019 mulai muncullah virus yang berasal dari luar negeri dan berhasil menyebar di lingkup domestik, virus tersebut diberi nama covid-19 oleh badan *expert* di lingkup kesehatan skala internasional atau biasa disebut dengan WHO, penyakit tersebut telah mendapat klaim dunia sebagai pandemi, yaitu penyakit yang terjadi bukan hanya di satu negara, melainkan telah mewabah di lingkup internasional dan bersifat mematikan.

Impact dari adanya virus tersebut mulai terasa pada tahun 2020, berupa ribuan nyawa telah hilang, terjadi problematika kompleks pada tatanan moneter negara yang menjadi efek domino atau bisa disebut sebagai efek mekanikal, yaitu suatu efek yang dapat menyebabkan efek lain secara berkesinambungan dan bersifat menyebar, saat kondisi moneter suatu negara mengalami gangguan, maka tak dapat dihindari bahwa akan terjadi kontraksi pada *income* negara, sebelum *income* negara mengalami kontraksi secara dalam, hal yang pertama kali terkena *impact* dari pandemi adalah kontraksinya angka konsumsi biasa dilambangkan dengan huruf C pada akumulasi GDP, hal ini disebabkan adanya pembatasan mobilisasi yang bertujuan untuk menghentikan secara perlahan penjangkitan virus yang ada, saat mobilisasi masyarakat dibatasi, maka efek yang timbul selanjutnya yaitu adanya gangguan pada dunia produksi, distribusi pasokan akan terhambat yang menjadikan susahnyanya barang masuk ke dalam pasar, kekacauan produksi tersebut menyebabkan adanya kelangkaan pada beberapa barang seperti stok masker akan mengalami *scarcity* (memiliki

makna kelangkaan) sehingga harga akan melonjak secara drastis, dalam teori Keynes yang dicetuskan oleh seorang yang *expert* di lingkup ekonomi, warga negara *Great Britain* menyatakan bahwasanya problematika dalam alur produksi hingga konsumsi akan menjadikan fenomena eskalasi harga barang secara jangka pendek, maka dapat diperoleh persepsi bahwasanya fenomena eskalasi harga masker merupakan hal yang searah dengan argumen Keynes, bukan berhenti sampai di situ, efek lain yang berujung pada efek kumulatif yaitu kontraksinya angka daya beli yang menjadikan profit produsen menurun dan berimbas pada PHK besar-besaran, saat kontribusi konsumsi mengalami kontraksi pada akumulasi GDP, maka profit yang diperoleh produsen (perusahaan) juga akan mengalami kontraksi, hal itulah yang menjadi pemicu pemutusan sepihak hubungan kerja, saat laba mengalami kontraksi maka dunia investasi akan membukukan defisit pada laporan Bursa Efek, menjadikan indeks yang mengukur harga surat-surat kepemilikan modal (saham) menjadi merah dan turun drastis akibat banyaknya *capital outflow* dari pasar modal skala domestik.

Unsur penyusun *income* negara terdiri dari lima komponen penting, yaitu kontribusi konsumsi yang biasa disimbolkan dengan huruf C memberikan sumbangsih nomor satu terbesar pada akumulasi GDP atau kepanjangan dari *Gross Domestic Product*, C memberikan kontribusi sebesar 58% terhadap akumulasi GDP, investasi menjadi komponen penting nomor dua dalam penyusun *income* negara, dan kemudian dilanjutkan oleh

spending government, ekspor serta kegiatan impor yang dilakukan warga atau Nusantara itu sendiri. Saat pandemi tiba, angka daya beli mengalami kontraksi drastis, investasi juga membukukan angka defisit, adanya mobilisasi yang dibatasi juga menyebabkan kegiatan ekspor menjadi terhambat sehingga terciptalah angka minus pada neraca perdagangan, defisit tersebut merupakan *impact* dari melemahnya komoditas barang yang dijual ke luar negeri (perdagangan skala internasional), tiga komponen krusial dalam penyusun *income* negara telah mengalami kontraksi cukup tajam maka yang terjadi selanjutnya dapat dipastikan bahwa angka dari pertumbuhan moneter tersebut akan mengalami kontraksi tajam, hal ini dibuktikan dengan informasi yang diperoleh dari BPS menyatakan bahwasanya telah terjadi -5,32% pada pertumbuhan moneter Indonesia di Bulan April hingga Juni 2020 atau biasa disebut dengan istilah kuartal 2 2020 dengan Informasi inflasi sebesar 1,68%, inflasi pada saat itu mengalami kontraksi sebab pada periode sebelumnya inflasi Nusantara berada pada angka 2,72%. (Bank Indonesia, 2022)

kontraksi yang ada pada inflasi dan minusnya pertumbuhan moneter merupakan *impact* dari keberadaan pandemi yang cukup mampu menjadikan Indonesia masuk ke dalam resesi, defisit pada pertumbuhan moneter tersebut berlanjut hingga kuartal 1 2021 sehingga menjadikan Nusantara resmi masuk kedalam resesi, jika dikalkulasikan kontraksi pertumbuhan tersebut terjadi selama empat kuartal, satu kuartal atau satu triwulan memiliki makna tiga bulan, sedangkan Indonesia saat itu

mengalami defisit ekonomi secara empat kuartal berkesinambungan atau dalam kata lain selama satu periode.(Bank Indonesia, 2022)

Inflasi yang terjadi pada tahun 2020 berada pada angka 1,68%, inflasi mengalami kontraksi sebab konsumsi juga mengalami kontraksi, perlu diketahui bahwa inflasi merupakan proyeksi dari kuat atau lemahnya angka daya beli itu sendiri, sehingga inflasi dan daya beli memiliki korelasi positif dan bersifat searah, jika dijabarkan maka saat persentase inflasi suatu negara mengalami eskalasi maka saat itu juga angka C dalam lingkup Nusantara juga mengalami pertumbuhan, saat itu daya beli mengalami kontraksi akibat *impact* terbesar dalam kemunculan pandemi, adanya pembatasan mobilisasi, keterbatasan pasokan dari sisi *supply* menjadikan *scarcity* dan kelonjakan harga pada komoditas tertentu, berjuta *labour* mengalami PHK sehingga terjadilah eskalasi pada pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada merosotnya angka *demand* yang ada, saat efek kumulatif tersebut telah menyentuh pada angka *demand*, maka inflasi akan bergerak menyesuaikan dengan posisi *demand* masyarakat, hal itulah yang mendasari pemicu dari kontraksi inflasi pada tahun 2020.(Haryono, 2021)

Untuk memulihkan angka *demand* (biasa dilambangkan dengan huruf d) yang mengalami pelemahan, maka pemerintah bekerja sama dengan bank sentral dan juga pihak pembuat strategi fiskal ataupun non fiskal untuk melakukan *recovery*, dengan cara menggelontorkan dana untuk PEN (memiliki makna pemulihan ekonomi nasional), yang awalnya hanya

berjumlah Rp. 455,62 Triliun, kemudian disuntikkan lagi stimulus sebesar Rp. 695,2 Triliun, namun perlu diketahui bahwasanya stimulus yang di gelontorkan tersebut hanya mampu menjadikan inflasi naik tipis yaitu dari 1,68% pada 2020 menjadi 1,87% pada tahun 2021, pemerintah dan pihak terkait merasakan belum adanya perbaikan ekonomi yang cukup maksimal, maka dari itu pemerintah menggelontorkan stimulus lain sebesar Rp. 744,7 triliun demi katalisator *recovery* ekonomi, sehingga apabila dikalkulasikan secara keseluruhan, maka akumulasi dana dalam upaya *recovery* pasca pandemi selama 3 periode (1 periode dalam ilmu ekonomi memiliki makna 1 tahun) berjumlah Rp. 1.895,5 triliun.

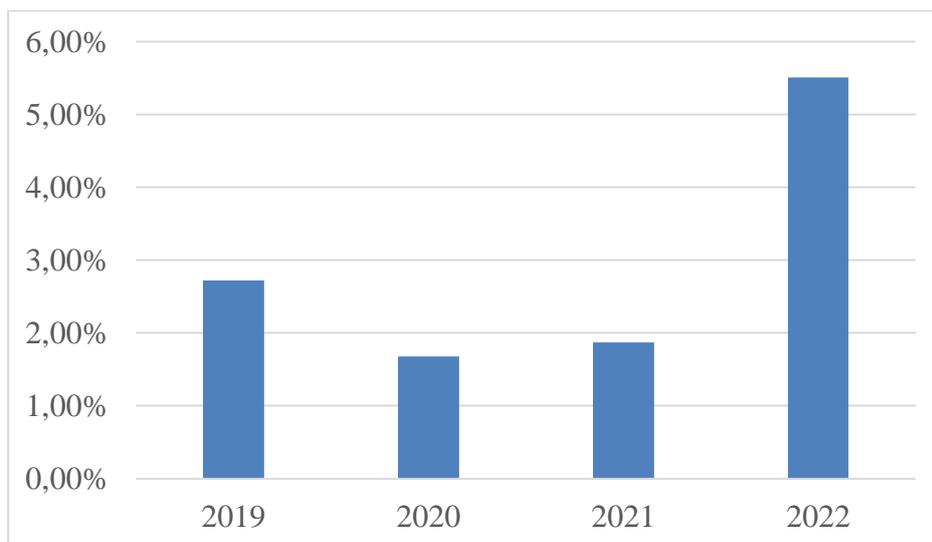
Stimulus yang digelontorkan merupakan salah satu upaya fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi, perlu diketahui bahwa peran fiskal dan moneter berada pada satu tujuan yang sama yaitu menciptakan kondisi ekonomi berada pada titik stabilisasi, namun dalam implementasi kebijakannya fiskal lebih condong pada arah *income* dan *spending* suatu negara yang tertuang dalam APBN, fiskal memiliki kendali yang lebih tinggi dari pada instrumen moneter maka dari itu fiskal lebih sering disebut sebagai *leader* kebijakan Indonesia, selain itu fiskal memiliki sebutan lain yaitu sebagai politik anggaran hal ini disebabkan dalam implemementasi kebijakannya bersifat mengatur APBN negara, kebijakan ini merupakan wewenang penuh dari kementerian di bidang moneter, yang kemudian di ketok palu oleh presiden dan kemudian disahkan oleh pimpinan negara yaitu presiden. Fiskal bersifat terbalik dengan moneter, jika fiskal lebih condong

pada *cash flow* pemerintah maka moneter memiliki wewenang untuk mengatur peredaran uang masyarakat, dalam dunia ekonomi hal ini biasa disebut sebagai kuantitas uang beredar dan di singkat JUB, kebijakan ini merupakan wewenang dari BI selaku bank otoritas negara atau bank sentral (bank dengan kedudukan nomor satu di suatu negara), selain itu wewenang lain yang dimiliki bank sentral yaitu mengatur dan mengendalikan *interest rate* atau biasa di sebut sebagai politik diskonto, politik diskonto memiliki makna yang sama dengan BI Rate, kebijakan ini bersifat melengkapi strategi fiskal demi mengupayakan stabilisasi perekonomian negara.(Hendartyo, 2022)

Selain inflasi telah mengalami eskalasi perlahan pada tahun 2021, pertumbuhan moneter juga mengalami eskalasi yaitu sebesar -0,74%, perlu diketahui bahwasanya pada saat itu Indonesia masih terperosok ke dalam resesi walaupun terjadi eskalasi tipis oleh persentase inflasi dan juga eskalasi income negara, defisit pertumbuhan moneter saat itu merupakan kabar baik sebab telah terjadi eskalasi ekonomi secara perlahan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (selanjutnya disebut dengan istilah *year on year*), hal ini didukung oleh informasi bahwasanya telah terjadi kontraksi pada pertumbuhan moneter selama 4 kuartal, yang diawali dengan kuartal 2 2020 sebesar -5,32%, pada kuartal selanjutnya terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang defisit, yaitu -3,49%, pembukuan defisit pada pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021, kemudian pada kuartal 4 2020 pertumbuhan ekonomi masih

membukukan minus yaitu sebesar -2,19%, dan titik resesi diakhiri pada kuartal 1 2021 yaitu sebesar -0,74%.

Pada 2021 kuartal 2 Indonesia mampu keluar dari resesi dan membukukan surplus 7,07% dalam hitungan kuartal, eskalasi tersebut terus berlanjut hingga pembukuan GDP secara tahunan atau biasa disebut sebagai hitungan *year on year*, hal itu merupakan *impact* dari suntikan ketiga yang diberikan oleh strategi fiskal sebesar Rp. 744,7 triliun, yang apabila dikalkulasikan seluruh total PEN dari segi stimulus fiskal yang digelontorkan Kementerian Keuangan berjumlah sekitar Rp. 1.800 triliun. Informasi ini merupakan informasi yang terdapat dalam badan pusat statistik, perlu diketahui bahwa 1 kuartal atau memiliki nama lain triwulan, dalam ilmu ekonomi terhitung selama 3 bulan hingga dapat disimpulkan bahwa satu periode terdapat 4 kuartal, jika dalam jangka waktu 2 kuartal ekonomi mengalami penyusutan maka negara yang berkaitan telah resmi berada pada titik resesi, saat itu Indonesia mengalami minus selama 4 kuartal pada laporan moneter atau dalam kata lain selama satu periode. Selain itu adanya resesi di Indonesia juga diperkuat oleh beberapa bukti dalam fenomena lain yaitu adanya kontraksi pada daya beli, penyusutan kegiatan penanaman modal biasa disebut sebagai investasi (baik investor *domestic* ataupun investor asing atau PMA), kontraksi angka ekspor, eskalasi pengangguran, eskalasi kemiskinan dan lain-lain.(Badan Pusat Statistik, 2020)



Gambar 4.2 Inflasi Indonesia 2019-2022

Sumber: Bank Indonesia (Tahun 2019-2022)

Korelasi yang terjadi antara inflasi, daya beli dan juga laporan moneter (biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi) memiliki korelasi positif, yang berarti berjalan searah dan tidak bertolak belakang, perlu diketahui jika korelasi dua atau beberapa variabel bersifat bertolak belakang maka korelasi tersebut bernilai negatif, saat dijabarkan maka hal ini memiliki makna bahwa saat *demand* atau memiliki nama lain kontribusi daya beli mengalami eskalasi yang diproyeksikan melalui eskalasi persentase inflasi dan berujung pada surplusnya laporan moneter.

Indonesia pada tahun 2022 berhasil membukukan surplus 5,31% pada GDP yang ada dan diimbangi dengan inflasi sebesar 5,51%. Inflasi memiliki korelasi erat dengan laporan moneter yang naik signifikan merupakan indikasi bahwa dunia ekonomi telah mengalami *recovery* dan pertumbuhan pesat pada segala sektor, hal ini tidak terlepas dari peran stimulus yang ada, stimulus tersebut merangsang dan menyebabkan efek

kumulatif positif berupa eskalasi pada keuangan segala sektor khususnya sektor dari *demand* masyarakat yang dapat menjadi pemicu eskalasinya sektor lain seperti pusat belanja, dunia perhotelan, penanaman modal baik investor domestik ataupun investor penanaman modal asing, kegiatan ekspor, dan lain-lain, hal ini dikrenakan adanya efek domino yang timbul akibat eskalasi daya beli. (Bank Indonesia, 2022)

4.4.2 Strategi Kebijakan Moneter Menghadapi Ancaman Resesi dengan Pengendalian Inflasi

Pada tahun 2022, segala sektor yang ada di Nusantara mengalami *recovery* secara drastis, hal ini dibuktikan oleh persentase inflasi yang mengalami eskalasi secara pesat yaitu berada pada angka 5,51% dalam hitungan 1 periode, inflasi yang baik berada dalam range 2 hingga 4% pada satu periode, maka dari itu dapat dijabarkan bahwasanya Indonesia telah tumbuh dan benar-benar pulih dari kondisi resesi di tahun 2020 hingga 2021, inflasi yang tinggi menjadi proyeksi bahwa pertumbuhan moneter sedang mengalami eskalasi yaitu sebesar surplus 5,31% dalam periode 2022, pertumbuhan ekonomi selama 1 periode biasa disebut sebagai *income* negara yang tertuang dalam kalkulasi *Gross Domestic Product* atau memiliki nama lain Produk Domestik Bruto.

Tingginya pertumbuhan tersebut membuat *income* Indonesia juga mengalami eskalasi dengan akumulasi kurang lebih Rp. 19.588,4 Triliun pada laporan GDP Indonesia, GDP ini memiliki nama lain sebagai PDB. Berdasarkan laporan dari suatu badan pemerintah memiliki tanggung jawab

yang ditujukan pada Joko Widodo selaku pimpinan negara (presiden) memberikan informasi bahwasanya GDP ini mengalami pemulihan setelah 2 tahun terakhir GDP yang ada mengalami kontraksi drastis hingga menyentuh titik resesi akibat *impact* dari pandemi.

Laporan keuangan Indonesia selama 2 tahun belakangan ini berada pada angka -2,07% pada periode 2020 dan surplus 3,70% pada periode 2021, GDP pada tahun 2022 berada pada range 5,31% dan hal tersebut memberikan penilaian bahwa strategi atau kebijakan yang diimplementasikan pemerintah bergerak cukup efektif (tepat sasaran) baik kebijakan lingkup fiskal, non moneter ataupun lingkup moneter. Contoh dari implementasi kebijakan fiskal dan moneter yaitu suntikan PEN dan stimulus ekspansif lainnya (menambah kuantitas peredaran rupiah pada masyarakat luas), sedangkan jika dijabarkan lebih detail implementasi fiskal lebih mengarah pada stimulus pajak, pengadaan subsidi pada bidang edukasi, bahan bakar (BBM), kesehatan dan lain-lain. Sedangkan jika dilihat dari kebijakan lingkup moneter untuk upaya *recovery* yaitu adanya penurunan pada *interest rate*, pembelian *commercial paper*, penurunan pada kewajiban GWM atau *cash ratio*, contoh implementasi strategi non fiskal dan non moneter adalah segala kebijakan yang tidak memberi pengaruh langsung pada *income* atau *spending* negara yang berkaitan, tidak mempengaruhi kuantitas peredaran uang seperti adanya ketetapan pada harga eceran maksimal (HET), pengawasan terhadap barang pasokan atau barang pasar, upaya untuk mendorong produksi dan lain-lain.

GDP Indonesia (pertumbuhan ekonomi tiap periode) pada tahun 2016 hingga 2019 berada di range 5% dan Indonesia pada tahun 2022 mampu membukukan surplus 5,31% setelah pulih dan bangkit dari keterpurukan resesi yang mencekam selama satu tahun, pada kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021 Indonesia mengalami resesi dan penyusutan ekonomi secara drastis dan membukukan defisit pada GDP nya yaitu sebesar -2,07%. (Badan Pusat Statistik, 2023)



Gambar 4. 2 Gross Domestic Product Indonesia (Y on Y)

Sumber: Badan Pusat Statistik (Tahun 2016-2022)

GDP Indonesia mengalami eskalasi pesat dan bahkan eskalasi ekonomi tersebut di nilai jauh lebih tinggi dari 6 tahun terakhir, kemudian muncullah anggapan dari pemerintah bahwa kondisi yang terjadi saat ini berada pada titik stabilisasi dan bahkan lebih tinggi dari proyeksi periode sebelumnya, hal ini merupakan *impact* positif dari stimulus yang disuntikkan secara besar-besaran dan membuahkan hasil yang cukup

maksimal, namun yang menjadi tugas pemerintah saat ini yaitu mengatur laju pertumbuhan yang ada agar persentase inflasi tidak naik terlalu tinggi, sebab inflasi yang terlalu tinggi dapat menjadi katalis resesi, hal ini diakibatkan saat harga mengalami eskalasi yang cukup pesat bersifat menyebar dan terjadi pada semua barang, yang menjadi kekhawatiran pemerintah selanjutnya yaitu tidak adanya kemampuan *demand* untuk menggapai harga tersebut atau dalam kata lain *demand* yang ada tidak dapat mengimbangi mahalannya harga barang yang ditawarkan, saat *demand* masyarakat mulai terganggu maka saat itulah efek domino akan dimulai, yang berimbas pada penyusutan profit oleh pihak *supply*, kontraksi pada aktivitas penanaman modal, kontraksi pada neraca dagang, dan yang berujung pada minusnya *Gross Domestic Product* dalam hitungan *year on year* untuk kedua kali pasca pandemi, jika fenomena-fenomena tersebut terjadi lagi maka probabilitas resesi lagi akan semakin terbuka dan bersifat nyata.

Sebelum resesi tiba, maka pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia selaku Bank sentral Nusantara yang dibantu oleh Kementerian yang bergerak di lingkup moneter untuk mengatur persentase inflasi, hal ini merupakan wewenang BI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pada nomor 23, tepatnya Tahun 1999 terdapat penjelasan mengenai kebijakan moneter Indonesia dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh bank otoritas negara yaitu bank sentral dengan nama BI.(Utami, 2021)

Nama lain dari kebijakan ekonomi kontraktif ialah kebijakan uang ketat atau yang biasa di sebut dengan *tight money policy*, hal ini memiliki tujuan untuk menarik kuantitas peredaran uang yang terlalu banyak agar inflasi dapat terkontrol dalam laju yang stabil atau dalam kata lain inflasi tidak berada pada titik yang tinggi. Berikut merupakan strategi kebijakan moneter menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia tahun 2022:

1. Eskalasi *Interest Rate*

Hal pertama yang diimplementasikan dalam pengontrolan inflasi yaitu eskalasi suku bunga, instrumen ini biasa disebut sebagai politik diskonto, BI Rate atau *interest rate*. Berdasarkan hasil dari RDG (merupakan kepanjangan dari rapat yang dilakukan oleh dewan gubernur), BI memberi keputusan bahwasanya *interest rate* tahun 2022 berada pada angka 5,50%.

Interst rate berada pada angka 3,50% pada periode sebelumnya, sedangkan pada periode 2020 BI Rate berada pada kisaran angka 4-5%, perbandingan persentase *interest rate* yang terjadi pada tahun 2022 dengan 2021 ini mengalami eskalasi 25 *basis point* atau satuan ini biasa disebut dengan bps, keputusan yang diambil ini berdasarkan hasil RDG Bulan Desember tepatnya pada tanggal 21 hingga 22 periode 2022, hal ini diimplementasikan demi mengontrol persentase inflasi agar berada pada range 3%, perlu diketahui bahwasanya inflasi yang sehat dan baik untuk negara *emerging market* (memiliki makna negara berkembang) ataupun

negara maju berada pada range 2 hingga 4% dalam tiap periode. Saat inflasi terkontrol dengan sehat maka dapat meminimalisir penyusutan *exchange rate* yang berarti nilai tukar tidak akan terdepresiasi terlalu dalam, saat ini pada bulan Maret 2022 tanggal 25 tiap dolar setara dengan Rp. 15.166. Selain itu terdapat pemicu lain yang dapat menjadi pendorong ataupun penghambatnya penguatan *exchange rate* seperti faktor eskalasi impor ataupun ekspor (berimbang pada neraca dagang), tingginya *income* negeri paman sam, *cadev* (memiliki makna kepanjangan devisa atau mata uang dollar) yang ada dalam negeri, penyusutan harga benda ekspor, kebijakan yang diimplementasikan oleh negara yang berkaitan, DHE memiliki makna devisa hasil penjualan ke manca negara, *interest rate*, serta keadaan moneter suatu negara yang dapat tercermin dari GDP, *cash flow* negara, ataupun informasi yang terdapat dalam pertumbuhan moneter. (Putri, 2023)

Perlu diketahui bahwa dalam implementasi eskalasi *interest rate* menurut banyak negara (di skala global) cukup menjadi kebijakan yang tepat sasaran atau dinilai efektif dalam upaya pengontrolan dan juga peredaman eskalasi harga yang bersifat menyeluruh dan juga meluas, sebab strategi ini juga diimplementasikan oleh negara maju yang memiliki power terkuat di skala internasional yaitu Negeri *Uncle Sam*. Menurut opini dari banyak pimpinan negara dunia, *interest rate* memiliki korelasi yang sangat erat dengan arah inflasi kedepannya, saat bank sentral yang dijadikan acuan bank konvensional suatu negara mengimplementasikan eskalasi *interest rate* maka bank lain juga akan mengimplementasikan hal yang sama, sebab bank

sentral memiliki wewenang sebagai pengatur dan pengontrol kebijakan seluruh bank yang ada di negara berkaitan terutama dalam hal mengontrol *interest rate*, simpanan wajib bank konvensional pada bank sentral (selanjutnya disebut sebagai GWM yang memiliki makna simpanan wajib minimum, simpanan ini juga biasa disebut dengan istilah *cash ratio*), dan instrumen yang lainnya.

Saat eskalasi *interest rate* terjadi maka yang selanjutnya terjadi adalah efek mekanikal yaitu *fee* yang dikeluarkan oleh bank umum juga mengalami eskalasi, hal ini kemudian terus mengalami keberlanjutan hingga ke pihak debitur, yang memiliki makna *interest rate* kredit atau bunga pinjaman baik yang berupa kredit penanaman modal, kredit daya beli (konsumsi), beban bunga dari pinjaman itu sendiri juga akan bereskalasi, terdapat *impact* lain dalam implementasi strategi eskalasi *interest rate* yaitu terjadinya pengetatan likuiditas di bidang perbankan yang menjadikan eskalasi pada bunga suatu tabungan (biasa disebut dengan istilah *saving* di dunia ekonomi) dalam rangka untuk menaikkan DPK, DPK memiliki makna sebagai dana yang didapatkan dari pihak ketiga.

Dana yang disimpan oleh bank umum merupakan uang dari hasil tabungan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan istilah DPK, contoh dana tersebut ialah *saving giro*, simpanan *saving* itu sendiri (tabungan), dan juga uang yang disimpan dalam bentuk deposit yang memiliki jangka tempo tertentu untuk melakukan aktivitas pencairan dananya, perlu diketahui saat melakukan pencairan pada bukan jangka waktu deposit, maka nasabah yang

berkaitan akan terkena *penalty*, *penalty* sendiri ialah suatu denda yang meliputi *fee* administrasi dan pangkasan yang terdapat pada nilai pokok *saving* dan diberikan oleh pihak bank pada nasabah yang melakukan aktivitas pencairan pada deposit atau deposito sebelum waktu yang telah menjadi kesepakatan di awal.

Saat *interest rate* mengalami eskalasi, maka terjadi eskalasi pula pada bunga *saving* masyarakat yang tertuang dalam dana himpunan masyarakat (biasa disebut sebagai DPK) sehingga menjadikan masyarakat akan mengalami ketertarikan untuk menabung, saat DPK mengalami eskalasi maka kuantitas uang beredar akan berkurang secara perlahan hingga pada akhirnya efek domino tersebut berimbas pada penyusutan persentase inflasi.

Masyarakat akan mengurangi tingkat konsumsi apabila suku bunga berada pada angka yang tinggi, seperti contoh saat terjadi eskalasi pada *interest rate* maka beban bunga pada pinjaman jenis KPR (memiliki kepanjangan kredit untuk memiliki rumah) juga akan mengalami tren eskalasi, hal tersebut menyebabkan melemahnya *interest* masyarakat untuk mengajukan KPR dan berimbas pada penyusutan *demand*, *demand* biasa disebut sebagai daya beli atau angka konsumsi, saat angka *demand* mengalami kontraksi yang dihadapkan dengan kondisi pasokan barang tetap atau stabil (dari pihak *supply*) maka secara teknis akan terjadi penyusutan pada harga properti dan efek mekanikal tersebut akan berujung pada penyusutan persentase inflasi itu sendiri, maka dari itu instrumen eskalasi

interest rate menjadi strategi yang tepat sasaran atau dinilai efektif oleh para pakar dalam upaya pengontrolan laju inflasi.

Dalam pemahaman ilmu yang mempelajari keadaan moneter suatu negara (ilmu ekonomi) kuantitas uang beredar memiliki korelasi erat dengan eskalasi harga barang-barang, hal ini searah dengan teori yang dicetuskan oleh Irving Fisher yaitu seorang yang *expert* di dunia ekonomi berasal dari Negeri *Uncle Sam*, selain itu Fisher juga merupakan pakar di bidang ekonomi jenis neoklasik yang pertama kali di negeri tersebut. Fisher menyatakan bahwasanya kuantitas uang beredar yang terlalu banyak akan menjadikan inflasi berada pada tren eskalasi, semakin banyak kuantitas uang beredar maka semakin tinggi pula risiko *high inflation* atau bahkan inflasi yang *hyper* (sukar untuk dikontrol dan memiliki pergerakan yang sangat liar), begitu juga sebaliknya saat menginginkan inflasi berada pada tren penyusutan maka yang harus dibenahi pertama kali ialah kuantitas dari uang beredar itu sendiri, yaitu melakukan penarikan pada uang yang dipegang masyarakat, selain itu terdapat faktor lain pemicu *high inflation* yaitu fenomena tingginya variabel daya beli atau konsumsi dan kekacauan dalam sistem produksi yang selanjutnya mengakibatkan adanya *scarcity* barang. (Ramadhani, 2020:1)

Implementasi eskalasi suku bunga dinilai efektif dalam mengontrol laju inflasi yang ada di suatu negara, melalui eskalasi bunga kredit ataupun bunga saving yang ditawarkan pihak perbankan, seperti yang terjadi pada tahun 2022 suku bunga berada pada angka 5,50% yang menjadikan inflasi

di tahun 2022 sebesar 5,51% menjadi turun ke angka 4,33% pada bulan April 2023 dalam hitungan month to month, fungsi dari eskalasi suku bunga bukan hanya untuk mengontrol laju inflasi, namun hal itu juga akan berimbas pada jumlah penawaran uang yang diberikan suatu negara ataupun permintaan dari uang itu sendiri, selain itu instrumen ini juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi ataupun menabung. (Bank Indonesia, 2022)

Implementasi eskalasi *interest rate* memiliki kendala seperti Adanya probabilitas resesi di masa mendatang apabila *interest rate* terlalu tinggi, adanya perbedaan dalam *interest rate* tiap perbankan yang berimbas pada profit yang diperoleh pada penjualan produksi akan mengalami penyusutan, perlu diketahui bahwa profit dari produsen khususnya manufaktur besar memberikan efek domino pada perekonomian, jika penurunan ini berlanjut dalam waktu yang lama akan menjadikan adanya PHK karyawan, yang dilanjutkan oleh penurunan angka investasi dan berakhir pada kontraksinya daya beli, hal itu menjadikan GDP Indonesia akan mengalami penurunan, jika kontraksi yang berlangsung terjadi dalam waktu lama maka timbullah probabilitas resesi di kemudian hari, sehingga bank Indonesia harus memikirkan secara matang tekat pengambilan keputusan eskalasi *interest rate*.

2. Penjualan Surat Berharga

Instrumen kedua yang dapat diimplementasikan dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi di lingkup moneter adalah *open*

market, istilah ini biasa disebut dengan penjualan *commercial paper* (surat berharga), yang di maksud dengan istilah *commercial paper* merupakan sebuah kertas yang memberikan sejumlah benefit tertentu terkait perolehan dari bagian asset yang dimiliki perusahaan, menurut pakar tidak semua surat masuk dalam kategori *commercial paper*, hanya surat tertentu yang dianggap memiliki *value money* yang masuk kategori *commercial paper*, *value money* yang di maksud setara dengan *value* yang dimiliki oleh uang cash atau uang kartal, sehingga *commercial paper* tersebut dapat diimplementasikan sebagai media pembayaran yang dapat dicairkan sewaktu-waktu (namun ada proses atau tahapan tertentu), perlu diketahui bahwa *value money* tersebut haruslah mendapat pengakuan serta memperoleh perlindungan dari suatu hukum yang ada di negara berkaitan, *commercial paper* biasa dipakai untuk aktivitas perniagaan (dalam rangka penyebaran atau penarikan peredaran uang), bukan hanya itu, *commercial paper* ini juga dapat digunakan sebagai aktivitas perniagaan, pembayaran, penarikan, dan aktivitas lain yang serupa. (Kartawinata dkk., 2020:125)

Commercial paper biasa disebut dengan istilah *negotiable instruments*, namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah efek, adapun sebelum *negotiable instruments* dijadikan sebagai instrument pembayaran terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seperti terdapat paraf yang merupakan bukti persetujuan dari pihak yang berkaitan, adanya lisensi yang bersifat memerintah ataupun kesepakatan melakukan pembayaran, adanya nama-nama dari pihak yang berkaitan khususnya penanggungjawab

negotiable instruments dalam rangka melakukan pembayaran melalui *commercial paper* tersebut, tercantumnya jangka waktu dalam aktivitas penyerahan dan pelunasan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam KUHD (memiliki istilah lain yaitu suatu kitab yang berisikan hukum perniagaan dan telah memperoleh perlindungan dari undang-undang atau hukum), dalam titel 7 dan juga titel 6 khususnya di Buku 1, terdapat diversifikasi wujud *negotiable instruments* antara lain: *trade acceptance* atau lebih dikenal sebagai istilah wesel, konoseme yaitu formulir yang berisi syarat yang harus dipenuhi atas kegiatan kontrak, cek, surat kesanggupan (memiliki nama lain aksep ataupun promes) dan lain-lain.

Negotiable instruments selain yang tercantum dalam KUHD tersebut adalah surat saham, surat utang atau biasa disebut sebagai obligasi, surat perintah atau dapat disebut sebagai bilyet giro, *travels cheque* dan kartu kredit juga masuk dalam kategori *negotiable instruments*, sedangkan contoh *negotiable instruments* yang sering diimplementasikan untuk instrument pengendalian peredaran uang dan juga aktivitas Repo (memiliki nama lain *Repurchase Agreement*) ialah SBI yang memiliki makna sertifikat bank sentral yaitu BI, sertifikat ini merupakan sebuah kertas yang berisi pengakuan utang atau kewajiban yang harus dibayar dengan tempo jangka pendek yang menganut sistem perolehan bunga atau biasa disebut diskonto, tujuan dari pengeluaran sertifikat ini yaitu sebagai instrumen katalis dalam peredaran ataupun penarikan kuantitas uang yang ada di masyarakat. Selain sertifikat ini terdapat instrumen lain yang di anggap sebagai kategori

negotiable instruments sah di Nusantara yaitu *commercial paper* pasar uang (biasa disingkat dengan SBPU), surat ini memiliki jangka waktu yang tergolong pendek dan menggunakan sistem diskonto, contoh *commercial paper* pasar uang adalah promes ataupun aksep dan *trade acceptance*. Selain itu terdapat *negotiable instruments* lainnya seperti obligasi, surat yang menyatakan pernyataan kepemilikan modal pada perusahaan atau perbankan tertentu yang selanjutnya disebut sebagai surat saham, SUN yang memiliki kepanjangan dari surat yang berisi pernyataan utang negara.

Obligasi dan SUN merupakan jenis dari surat utang, SUN adalah bentuk dari obligasi, selain itu terdapat *commercial paper* lain yang sering diperdagangkan yaitu SBN, penerbit SUN, SBN, obligasi adalah pihak pemerintah, SBN sendiri memiliki makna sebagai surat utang untuk memberikan pembiayaan pada anggaran negara, atau dalam kata lain masyarakat memberikan pinjaman ke pemerintah lalu pemerintah membalasnya dengan memberikan bunga pada tiap bulan, salah satu manfaat yang diperoleh dari transaksi SBN bagi masyarakat yaitu: mendapat jaminan keamanan oleh negara yang berkaitan, memiliki *yield* (imbal hasil atau bunga) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan *yield* deposito yang ditawarkan bank konvensional ataupun bank jenis BUMN, seperti SBN dengan jenis SR018 memiliki imbal hasil atau *yield* sebesar 6,40% pada tiap tahunnya dengan keterangan jangka waktu pelunasan 5 tahun, sedangkan untuk jangka tempo pelunasan 3 tahun memiliki imbal hasil sebesar 6,25% pada tiap periode, *yield* yang biasa

disebut imbal hasil ini bersifat tetap, tidak akan mengalami volatilitas walaupun negara yang berkaitan mengalami volatilitas ekonomi.(Malik, 2023)

Surat utang ini memiliki pungutan pajak yang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan penawaran deposito (jika deposito memberikan pungutan pajak sebesar 20% maka surat utang ini hanya memberi pajak 10%), *yield* atau bunga yang diperoleh masyarakat akan diberikan dalam tiap bulan sehingga dapat memberikan *passive income* atau tambahan pendapatan yang bersifat pasif, masyarakat tersebut turut memberikan kontribusi pada ekspansi negara. Untuk risiko wanprestasi atau gagal bayar maka peluang pemerintah untuk melakukan wanprestasi terhadap kewajiban SBN adalah sangat kecil, terkecuali negara yang berkaitan mengalami *kolaps* atau kebangkrutan.

LHKPN merupakan singkatan dari laporan atas kepemilikan harta oleh penyelenggara negara dalam bentuk suatu dokumen, bukan hanya berisi mengenai kepemilikan harta namun dokumen ini juga berisi tentang akumulasi dari kalkulasi *income*, *spending*, informasi yang bersifat personal dan lain-lain. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut setengah asset atau kapital yang dimiliki oleh seorang yang cukup memiliki wewenang dalam bidang mengatur edukasi, *culture*, penelitian, *information and technology* yang ada di Nusantara yaitu Nadiem Makariem tercatat bahwa setengah kepemilikan assetnya berada dalam bentuk *commercial*

paper atau yang memiliki nama lain *negotiable instruments*.(Wahhab, 2022)

Negotiable instruments ini biasa diimplementasikan sebagai media perniagaan dunia pengusaha, sebab *commercial paper* ini mendapatkan pengakuan bahwasanya lebih mudah untuk diimplemetasikan sebagai media transaksi, di anggap memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, memiliki jaminan dan lindungan dari suatu hukum yang ada di negara berkaitan, *commercial paper* ini memiliki *value* layaknya uang kartal atau uang cash, *commercial paper* juga memiliki benefit lain yaitu dapat ditukarkan dengan uang giral namun melalui beberapa proses terlebih dahulu, di dalam *negotiable instruments* terdapat hak istimewa seperti hak untuk penuntutan penyerahan suatu barang, hak untukpenaihan sejumlah uang ataupun hak tertentu yang memiliki korelasi dengan perusahaan yang berkaitan.

Negotiable instruments mempunyai beberapa unsur tertentu seperti bukti tuntutan pelunasan utang, dalam *negotiable instruments* terdapat akta atau bukti yang berupa tanda tangan pihak yang berkaitan yaitu pihak kreditur yang memegang surat akta untuk menuntut pelunasan utang kepada pihak yang bertanda tangan di akta yaitu pihak debitur, selain itu terdapat beberapa unsur lain seperti *negotiable instrument* dapat menjadi surat pembawa hak yang dimiliki oleh pihak kreditur, dan juga *negotiable instruments* ini di haruskan untuk mudah dicairkan atau dengan kata lain tidak sukar untuk dijual belikan.(Kartawinata dkk., 2020)

Surat berharga atau *commercial paper* ini di fungsikan sebagai dua sekuritas yang memberikan *income* secara pasif terhadap pihak yang memilikinya, dapat dijadikan sebagai media dalam investasi, jika berupa saham maka pasif *income* yang diterima bersifat tidak menetap sebab hal ini bergantung pada kebijakan rapat umum pemegang saham baik rapat yang bersifat tahunan atau rapat yang bersifat luar biasa atau dengan kata lain di luar jadwal rapat pemegang saha secara taunan, namun sebaliknya *commercial paper* ini dapat memberikan pasif *income* secara menetap apabila surat berharga yang di miliki berupa obligasi.(Kartawinata dkk., 2020)

Implementasi penjualan surat berharga yang terjadi pada tahun 2022 seperti penerbitan SBN ritel (memiliki nama lain ORI yaitu obligasi negara ritel) memiliki fungsi sebagai pemberian dukungan pembiayaan untuk sektor pembangunan seperti infrastruktur, berikut merupakan contoh obligasi yang dijual pada tahun 2022 seperti *saving bonds ritel* atau biasa disebut SBR dengan jenis SBR011, Obligasi negara ritel dengan jenis ORI022, ORI021, sukuk tabungan yang biasa disebut dengan ST dengan jenis ST009, sukuk ritel memiliki nama lain SR dengan jenis SR017, dan lain-lain, tiap obligasi tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda dalam masa penawaran seperti SBR011 memiliki masa waktu penawaran pada tanggal 25 Mei hingga 16 Juni periode 2022, ORI022 memiliki masa waktu penawaran pada tanggal 26 September hingga 20 Oktober 2022.(Bank Indonesia, 2022)

Implementasi penjualan *commercial paper* ini dinilai cukup efektif dalam mengendalikan jumlah uang beredar yang pada akhirnya dapat menurunkan angka inflasi saat ini, namun dalam implementasinya memiliki beberapa kendala seperti dalam proses pembukaan rekening SID yang memiliki kepanjangan dari *single investor identity* berlangsung cukup lama, adanya problematika pada konfirmasi data investor, adanya kendala pada pengiriman dana yang terjadi di teller bank, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas terkait teknis dalam pengiriman dana, dan lain sebagainya. Menurut bank Indonesia strategi dalam penjualan *commercial paper* ini menjadikan harganya akan mengalami penurunan dan memiliki efek domino terhadap perekonomian, yang berakhir pada penurunan jumlah uang beredar dan terjadinya eskalasi pada suku bunga (*yield* atau imbal hasil) yang ditawarkan, saat jumlah uang beredar telah mengalami kontraksi maka angka inflasi dapat dikendalikan. (Bank Indonesia, 2022)

3. Eskalasi *Cash Ratio*

Instrumen ketiga yang diimplementasikan oleh pihak bank sentral dalam upaya mengontrol inflasi yaitu eskalasi *cash ratio*, *cash ratio* merupakan istilah lain dari GWM atau simpanan wajib minimum bank konvensional terhadap bank sentral di negara yang berkaitan, hal itu di maksudkan agar dapat menarik lebih banyak peredaran uang yang ada di masyarakat dan berujung pada penyusutan angka inflasi, agar masyarakat mengalami ketertarikan maka sebelum *cash ratio* bank konvensional itu

bertambah maka implementasi eskalasi BI Rate perlu diimplementasikan terlebih dahulu, sebab instrumen *interest rate* dengan *cash ratio* memiliki korelasi yang cukup erat dan bersifat domino (suatu efek menimbulkan efek lain yang berjalan terus menerus akibat satu reaksi).

Penurunan atau kenaikan pada kewajiban giro minimum atau biasa di sebut dengan GWM besarnya di hitung dari persentase tertentu pihak dana ke tiga, dana pihak ketiga atau yang biasa di singkat dengan DPK ialah simpanan masyarakat yang berada di bank, contoh simpanan di sini dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan sertifikat depoisto, giro ialah memindahkan sejumlah uang yang berasal dari rekening satu ke rekening lain, giro kebalikan dari cek, sedangkan deposito adalah sejumlah uang yang berada dalam rekening dan memiliki jangka waktu tertentu untuk di ambil, seperti tiap satu, tiga, enam, atau dua belas bulan sekali, jika ketentuan dalam pengambilan uang dalam deposito dilanggar, atau sebelum jatuh tempo, maka yang terjadi selanjutnya adalah nasabah akan dikenakan *penalty* (cara baca pinalti) oleh pihak bank, *penalty* merupakan denda atau bisa juga berupa bunga yang dijanjikan oleh pihak bank tidak dibayarkan akibat pelanggaran tersebut. Bunga dari deposito jumlahnya lebih besar dari pada bunga tabungan, berkisar antara tiga hingga tujuh persen dalam setahun, namun deposito tiap bank berbeda-beda, sedangkan bunga dari tabungan hanya berkisar antara satu hingga tiga persen.(Harmony, 2021)

Giro wajib minimum sendiri adalah dana minimal dari bank konvensional (bank umum), bank Syariah (bank yang menganut system

agama islam), dan unit usaha Syariah yang harus di titipkan kepada bank sentral (bank Indonesia), giro wajib minimum dibagi menjadi dua, yaitu giro wajib minimum primer (dalam bentuk simpanan minimal pada saldo rekening), dan giro wajib minimum sekunder dalam bentuk SBI (sertifikat bank Indonesia), deposito, dan SBN (surat berharga negara).

Besarnya giro wajib minimum ditentukan oleh bank Indonesia dalam bentuk persentase untuk mempengaruhi liquiditas bank dan kuantitas uang beredar yang pada akhirnya akan meningkatkan angka inflasi sesuai target pemerintah. GWM yang memiliki nama lain giro wajib minimum yang ditujukan pada bank umum konvensional berada pada angka 9,0% yang diimplementasikan mulai tanggal 1 September periode 2022, sedangkan GWM yang diimplementasikan pada bank umum jenis syariah berada pada angka 7,5% yang diimplementasikan sejak tanggal 1 September periode 2022.(Bank Indonesia, 2022)

Implementasi Giro wajib minimum dinilai cukup efektif dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pinjaman atau kredit yang ditawarkan pihak perbankan, implementasi GWM ini memiliki beberapa kendala seperti sering terjadi penipuan dalam bentuk giro kosong ataupun cek yang diberikan oleh pihak terkait, adanya jangka waktu tertentu untuk melakukan pencairan dana sehingga pihak yang berkaitan harus rajin memantau jangka waktu pencairan. *Cash ratio* atau GWM merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan lingkup makro suatu negara melalui pengontrol

likuiditas keuangan, maka dari itu setiap bank umum baik konvensional maupun Syariah harus memenuhi standar giro wajib minimum yang telah ditentukan, apabila melanggar atau tidak dapat memenuhinya maka pihak perbankan akan dikenakan sanksi oleh bank sentral. GWM ini berupa saldo dalam bentuk rupiah dan valas atau valuta asing, semakin banyak persentase giro wajib minimum maka semakin sedikit penawaran kredit yang diberikan, maka tercapailah misi dalam mengontrol inflasi dan mengurangi jumlah uang beredar, begitu juga sebaliknya. (Bank Indonesia, 2022)

4. *Selective Credit Control*

Instrumen keempat adalah kebijakan kredit selektif atau *selective credit control*, *selective credit control* ialah kebijakan untuk mengurangi kuatitas peredaran uang dengan cara memberi syarat yang ketat bagi nasabah yang mengajukan pinjaman (kredit) ke bank umum dan bank syariah, jika nasabah memiliki 5C barulah akan di acc atau di terima dalam pengajuan pinjamannya, 5C tersebut adalah yang pertama character, inilah faktor utama yang paling kuat, yang kedua adalah *capability* (yaitu kemampuan nasabah untuk mengendalikan dana yang telah di pinjam), kemudian ada *collateral* (yaitu jaminan yang di beri nasabah apakah memiliki nilai setara dengan utang yang di ajukan dan bagaimana hak miliknya, dan faktor lain yang berhubungan dengan jaminan), yang keempat ada *capital* (yaitu modal yang di miliki nasabah haruslah kuat, agar dapat di pastikan bahwa nasabah mampu membayar utang yang telah di ajukannya), dan yang terakhir adalah *condition of economy* (kondisi

perekomian nasabah yang bersangkutan), 5C tersebut benar-benar wajib dan harus dimiliki nasabah saat kebijakan ekonomi kontraktif telah diimplementasikan dalam Indonesia, jika salah satu dari 5C tersebut tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka bank sentral menghimbau agar bank umum dan bank Syariah tidak menerimaajuan pinjaman dari nasabah tersebut.

Implementasi kredit selektif dinilai cukup efektif dalam menahan laju inflasi, daya beli, pengurangan jumlah uang beredar serta penyaluran kredit yang diberikan perbankan, namun perlu diketahui bahwasanya terdapat kendala dalam implementasi instrumen ini seperti akan terjadi probabilitas dunia usaha untuk mengalami keterbatasan dalam berekspansi, saat hal ini terjadi maka yang menjadi taruhan selanjutnya adalah GDP, yaitu GDP akan mengalami kontraksi secara perlahan, jika hal ini berlangsung terus menerus maka tidak menutup kemungkinan negara yang bersangkutan dapat masuk ke dalam resesi akibat pelemahan ekonomi.

Instrumen yang diimplementasikan oleh pihak bank sentral seperti eskalasi interest rate (memiliki nama lain politik diskonto atau BI Rate), penjualan *commercial paper* biasa disebut dengan istilah open market, eskalasi GWM atau *cash ratio*, dan kebijakan kredit selektif atau *selective credit control* diimplementasikan untuk mengontrol harga barang dan laju pertumbuhan moneter saat ini, instrument tersebut diimplementasikan saat ini namun tetap bergerak kondisional dan akan terus mengalami perubahan, sehingga dapat ditarik hasil ahir bahwasanya kejadian saat ini merupakan

impact dari kebijakan di periode sebelumnya, maka dari itu pemerintah yang berkaitan harus selalu memperhatikan indikasi perekonomian khususnya yang memberikan efek domino pada *income* negara seperti faktor konsumsi yang sekaligus merupakan kontributor terbesar dalam akumulasi GDP bangsa yaitu sebesar kurang lebih enam puluh persen dan faktor yang lainnya, faktor tersebut merupakan contoh faktor internal dalam pemicu keputusan akhir mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan suatu negara baik yang bergerak di lingkup fiskal, non moneter ataupun moneter.

Faktor ekstern juga perlu diperhatikan pemerintah khususnya di lingkup pusat dalam mengambil kebijakan yang akan diimplementasikan dan berujung pada pertumbuhan moneter Nusantara, faktor esktern atau eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari *impact* perekonomian yang dilakukan secara terbuka (perniagaan internasional), sistem tersebut sedikit banyak akan memberikan imbas terhadap *income* dan keputusan kebijakan suatu negara, sebab pada akhirnya perniagaan internasional akan memberikan sumbangsih pada akumulasi GDP yang berupa impor maupun ekspor Nusantara yang tertuang dalam formula perhitungan *Gross Domestic Product* dari sisi pengeluaran, saat ini hal yang paling krusial adalah perniagaan minyak di skala dunia atau biasa disebut dengan istilah internasional, perniagaan internasional ini merupakan salah satu contoh dari perwujudan adanya globalisasi. (Sungkawaningrum dkk., 2023)

Faktor harga minyak memiliki korelasi yang sangat erat dengan kurs mata uang yang dimiliki tiap negara, dikarenakan tiap kurs memiliki satuan

hitung yang berbeda-beda (berdasarkan acuan moneter tiap negara, *cash flow* yang ada, persentase inflasi dan faktor variabel yang lain) maka *impact* yang dihasilkan akan memiliki disparitas pada tiap negara, selain itu respon tiap negara dalam menghadapi harga minyak skala internasional cukup bervariasi juga disebabkan adanya disparitas dalam implementasi kebijakan yang ada.

Untuk sistem moneter domestik intervensi dari pihak yang berwenang seperti pemerintah tingkat pusat dapat menjadikan titik netral dalam volatilitas harga yang ada, dikarenakan harga akan terus mengalami perubahan maka harga barang lain juga akan mengalami perubahan, khususnya barang yang bersifat komplementer atau pelengkap maupun barang substitusi atau biasa disebut dengan barang pengganti, dikarenakan peranan minyak sangatlah krusial bagi keberlangsungan nusantara, maka dari itu harga minyak selalu menjadi sorotan sebab dapat memberikan *impact* yang cukup besar untuk kondisi moneter Nusantara baik secara jangka waktu menengah ataupun panjang.

Contoh lain faktor eksternal yang perlu diperhatikan dan memiliki *impact* pada pertumbuhan moneter yaitu remitansi, remitansi ialah pengiriman uang yang dilakukan oleh warga Indonesia yang bekerja di manca negara (selanjutnya disebut sebagai TKI maupun TKW) kepada penerima yang berasal dari Indonesia atau negara asalnya, remitansi ini memiliki dua *impact* untuk perekonomian Nusantara, *impact* tersebut ada yang berada di skala positif yang berarti baik untuk negara namun ada juga

yang memiliki *impact* negatif untuk Nusantara, contoh *impact* positif ialah dengan adanya remitansi maka devisa Nusantara akan mengalami eskalasi, saat devisa atau mata uang asing ini mengalami titik eskalasi hal tersebut dapat menjadi penolong dalam nilai tukar atau dalam kata lain saat rupiah mengalami tekanan hebat dalam nilai tukar terhadap *greenback* devisa yang ada di Nusantara dapat menjadi penopang agar depresiasi yang ada tidak bergerak terlalu dalam, maka dari itu walaupun Indonesia sempat menyentuh titik resesi selama periode pandemi (resesi satu tahun) cadangan devisa Indonesia akan selalu ada. Contoh lain dalam *impact* positif remitansi yaitu dapat menjadi bantuan dalam skala internasional, uang migran yang dikirimkan pada keluarga di negara asalnya menjadi salah satu penolong dalam arus moneter terbesar dalam negara *emerging market* seperti Indonesia.

Remitansi juga memiliki *impact* negatif yaitu berupa adanya ketergantungan pada *greenback (dollar)* atau mata uang asing, adanya probabilitas eskalasi impor sebab keluarga migran yang diberikan uang ditakutkan lebih gemar berbelanja di manca negara melalui e-commerce yang ada saat ini, hal tersebut akan menjadikan pembengkakan pada angka impor yang dapat berujung pada kalkulasi *income* Nusantara.

Impor memberikan *impact* negatif bagi Nusantara, sebab terlalu banyak mengimpor atau mendatangkan (membeli) barang dari manca negara juga dapat membunuh produksi domestik secara perlahan, jika alur produksi terhambat atau mengalami gangguan maka profit yang diterima

oleh produsen akan mengalami kontraksi dan hal itu berujung pada *minusnya* angka investasi yang dilakukan oleh pihak penanam modal (dalam hal ini bukan hanya investor domestik yang menjual kepemilikan sahamnya namun investor luar juga akan melakukan hal yang sama), jika dunia investasi telah mengalami kontraksi maka hal itu dapat menurunkan angka dari Gross Domestic Product Nusantara, selain itu impor juga diyakini dapat menjadi hambatan pada daya saing sehingga menjadikan produksi Nusantara mengalami kurangnya kompetitif untuk menguasai pasar sehingga tingkat suatu produktivitas domestik mengalami penyusutan, impor juga dapat menguras cadangan atau biasa disebut dengan cadangan mata uang asing yang dimiliki Nusantara.

Kontribusi devisa sangatlah krusial bagi tatanan moneter Nusantara, terdapat *impact* negatif lain dari ekspansi aktivitas impor yaitu menjadikan sumber daya yang ada kurang dapat berfungsi secara maksimal, teknologi tidak mengalami peningkatan, seluruh *impact* tersebut berakibat fatal pada stabilitas moneter negara atau dengan kata lain akan terjadi kontraksi pada income yang diterima Nusantara, maka dari itu muncullah kebijakan bahwasanya diperbolehkan impor hanya untuk barang-barang yang tidak ada di Indonesia khususnya dalam jumlah banyak atau dalam kata lain domestik belum mampu menghasilkan sesuatu barang sesuai dengan target yang ada (hambatan dalam teknologi, modal, dan lain-lain). Contoh lain faktor eksternal yang perlu diperhatikan dan memiliki *impact* pada pertumbuhan moneter yaitu Investasi. Investasi merupakan sebuah

kegiatan penanaman dana pada beberapa entitas atau perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk berekspansi atau memperluas pasarnya, perusahaan atau pihak yang membutuhkan modal biasa disebut sebagai emiten sedangkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan melakukan kegiatan penanaman dana atau modal biasa disebut sebagai investor, kegiatan ini dapat dilakukan oleh warga negara asal ataupun warga negara asing.

Investasi tidak selalu mendapatkan profit sebab *cash flow* perusahaan tidak akan selalu mengalami peningkatan atau surplus, perlu diketahui bahwasanya dalam kegiatan penanaman dana ini memiliki risiko yang cukup besar yaitu investor memiliki probabilitas untuk kehilangan sebagian atau bahkan seluruh dana yang telah disuntikkan pada emiten yang berkaitan, maka dari itu pentingnya menguasai teknik dalam menganalisis emiten yang akan diberikan dana, baik dalam segi teknikal ataupun segi dari fundamental emiten. Namun investor tidak perlu merasa khawatir dengan dugaan bahwa investasi memiliki probabilitas boncos yang sangat besar, investor juga memiliki probabilitas mendapatkan profit yang juga besar dari dana yang ditanamkan, sebab perusahaan atau emiten yang berkaitan akan memberikan pembagian profit pada investor di setiap periode (tergantung kebijakan masing-masing emiten) yang tetuang dalam dividen, dividen tersebut akan di transfer oleh pihak emiten ke dalam dana rekening nasabah yang berkaitan atau dapat disebut sebagai RDN. Maka dari itu bukan hanya probabilitas negatif namun terdapat juga probabilitas positif yaitu

mendapatkan cuan yang cukup besar. Selain itu selisih antara harga dalam penjualan saham dan pembelian kepemilikan modal awal dijadikan moment investor untuk mengambil profit dalam jangka menengah atau panjang, hal ini biasa disebut dengan istilah *capital gain* dalam dunia saham, namun jika selisih harga pembelian kepemilikan modal awal dengan harga penjualan yang dilakukan investor (yang terdapat dalam bursa) ini diambil atau dilakukan dalam jangka pendek maka hal tersebut memiliki kemungkinan besar lebih mengarah pada kegiatan *trading* bukan investasi.

Korelasi antara kegiatan investasi dengan income yang diterima Nusantara ialah kegiatan ini memberikan kontributor dalam komposisi penyusun *Gross Domestic Product*, seperti yang kita ketahui bahwa GDP yang ada terdiri dari 5 komponen penyusun, penyusun yang paling krusial adalah faktor dari daya beli atau dilambangkan dengan huruf C dan investasi, faktor ini mampu menjadikan penggerak kuat dalam menjalankan efek mekanikal moneter bangsa atau biasa disebut dengan efek domino dalam bahasa ekonomi, jika konsumsi mula terguncang maka akan terjadi kontraksi yang cukup drastis pada kalkulasi GDP di perhitungan akhir, selain faktor daya beli terdapat faktor krusial lain yaitu investasi yang memberikan kontributor terbesar kedua dalam kalkulasi GDP, saat investasi naik, konsumsi juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya saat investasi turun, GDP juga memiliki probabilitas untuk mengalami penyusutan, namun tidak akan sedrastis penurunan GDP yang disebabkan oleh kontraksinya angka daya beli (C) yang ada.

Dari hasil analisis diatas maka diperoleh hasil bahwasanya strategi kebijakan moneter menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi di Indonesia dapat melalui instrumen eskalasi *interest rate* (memiliki nama lain politik diskonto atau *BI Rate*), penjualan *commercial paper* biasa disebut dengan istilah *open market*, eskalasi GWM atau *cash ratio*, dan kebijakan kredit selektif atau *selective credit control* diimplementasikan untuk mengontrol harga barang dan laju pertumbuhan moneter saat ini, instrument tersebut diimplementasikan saat ini namun tetap bergerak kondisional dan akan terus mengalami perubahan, sehingga fakta dari kejadian saat ini merupakan *impact* dari kebijakan di periode sebelumnya, maka dari itu pemerintah yang berkaitan harus selalu memperhatikan indikasi perekonomian khususnya yang memberikan efek domino pada *income* negara.

Tabel 4. 1 Implementasi Kebijakan Moneter Pengendalian Inflasi

No.	Instrumen Kebijakan Moneter:	Implementasi:	Kendala:	Strategi:
1.	Eskalasi <i>interest rate</i>	Efektif	Adanya probabilitas resesi di masa mendatang apabila <i>interest rate</i> terlalu tinggi, adanya perbedaan	<i>Interest rate</i> pada tahun 2022 sebesar 5,50%, mengalami eskalasi sebesar 25 <i>basis point</i> keputusan yang diambil ini berdasarkan hasil

			dalam <i>interest rate</i> tiap perbankan.	RDG Bulan Desember tepatnya pada tanggal 21 hingga 22 periode 2022.
2.	Penjualan <i>commercial paper</i>	Efektif	Proses pembukaan rekening SID yang berlangsung cukup lama, problematika pada konfirmasi data investor, kendala pada pengiriman dana.	Penjualan SBR011, ORI022, ORI021, ST009, SR017, dan lain-lain.
3.	Eskalasi giro wajib minimum	Efektif	Sering terjadi penipuan dalam bentuk giro kosong ataupun cek yang diberikan oleh pihak terkait, adanya jangka waktu tertentu untuk melakukan pencairan dana sehingga pihak yang berkaitan harus rajin memantau jangka waktu pencairan	Giro wajib minimum bank umum konvensional berada pada angka 9,0% yang diimplementasikan mulai tanggal 1 September periode 2022, sedangkan GWM yang diimplementasikan pada bank umum jenis syariah berada pada angka 7,5% yang

				diimplementasikan sejak tanggal 1 September periode 2022
4.	Kredit selektif	Efektif	Terjadi probabilitas dunia usaha untuk mengalami keterbatasan dalam berekspansi yang berujung pada kontraksi GDP.	Pemberian syarat ketat bagi nasabah yang mengajukan kredit, nasabah harus memenuhi 5C yaitu collateral, capital, capability, character, condition of economy.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini peneliti mengambil problematika mengenai strategi kebijakan moneter untuk menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Kondisi moneter Indonesia cukup stabil pada tahun 2019, hal ini dibuktikan oleh persentase inflasi sebesar 2,72%, saat terjadi pandemi, daya beli mengalami kontraksi tajam sehingga membuat *cash flow* negara menjadi *minus* atau defisit selama satu tahun yaitu terjadi pada kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021 Indonesia mengalami resesi dan penyusutan ekonomi secara drastis dan membukukan defisit pada GDP nya yaitu sebesar -2,07% pada tahun 2020 yang diimbangi dengan penurunan inflasi menjadi 1,68%. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menggelontorkan stimulus besar-besaran (ekspansif) sebesar Rp. 1.895,5 triliun dalam upaya *recovery pasca* pandemi selama 3 periode yaitu tahun 2020 hingga 2021 dengan harapan daya beli akan mengalami eskalasi sehingga GDP atau biasa disebut dengan *Gross Domestic Product* dapat mencapai target yang diinginkan, stimulus tersebut dinilai telah tepat sasaran yang ditandai dengan surplusnya *cash flow* negara, GDP yang berada pada angka -2,07% pada periode 2020 perlahan mampu membukukan surplus 3,70% pada periode 2021 yang diimbangi dengan eskalasi inflasi menjadi 1,87%,

sedangkan pada periode 2022 GDP membukukan surplus sebesar 5,31% yang diikuti oleh inflasi yang berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 5,51%.

2. Pada tahun 2022 segala sektor yang ada di Nusantara mengalami *recovery* secara drastis, hal ini dibuktikan oleh persentase inflasi yang mengalami eskalasi secara pesat yaitu berada pada angka 5,51% dalam hitungan 1 periode (2022) namun seiring berjalannya waktu dampak negatif mulai terlihat akibat digelontorkannya stimulus besar-besaran tersebut mengakibatkan kuantitas uang beredar melebihi batas wajar, hal itu digambarkan oleh tingkat inflasi yang berada pada range yang cukup tinggi pada tahun 2022, maka bank sentral dan kementerian mengatasinya menggunakan stimulus kontraktif khususnya di lingkup moneter melalui eskalasi instrumen suku bunga, penjualan surat berharga, pengurangan kuantitas uang beredar, eskalasi *cash ratio* dan *selective credit control* untuk menghadapi ancaman resesi dengan pengendalian inflasi. Menurut peneliti strategi yang diimplementasikan pemerintah telah tepat sasaran atau dinilai efektif dalam upaya pengontrolan dan juga peredaman eskalasi harga yang bersifat menyeluruh dan juga meluas khususnya upaya menaikkan *interest rate* yang memberikan efek domino terhadap perekonomian. (Badan Pusat Statistik, 2023)

5.2 Saran

Lag dari kebijakan moneter ada dua macam, yaitu *inside lag* yang berarti jarak mulai timbul adanya permasalahan dan ekonomi sampai

dimulainya suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan yang kedua adalah *outside lag* atau yang disebut dengan *impact lag*, yaitu jarak antara dilaksanakannya kebijakan tadi dengan akibat atau effectnya pada perekonomian yang sedang terjadi. Semakin cepat waktu untuk menghasilkan efek pada perekonomian, maka semakin di nilai baik kebijakan moneter tersebut.

Sebaiknya pemerintah melakukan survey secara merata (biasa disebut sebagai survey pasar) terkait *impact lag* atau *outside lag* terkait implementasi kebijakan yang diimpleemtasikan, khususnya masyarakat yang berada di kalangan bawah hingga menengah, sebab kondisi eskalasi harga barang-barang ini beriringan dengan moment Ramadhan dan menjelang perayaan hari besar Islam, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya saat mendekati moment hari raya harga suatu barang akan mengalami eskalasi akibat permintaan yang melonjak tajam, hal ini beriringan dengan inflasi yang juga berada pada angka yang cukup tinggi maka eskalasi harga yang terjadi saat ini bersifat dua kali lipat. Pemerintah harus dapat mengontrol harga sehingga implementasi kebijakan ini tidak menciptakan problematika baru yang justru dapat membawa Indonesia ke jurang resesi lagi akibat pelemahan daya beli yang cukup drastis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2022). Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan dan Instrumennya. *Gramedia.com*. <https://www.gramedia.com/literasi/kebijakan-moneter/>
- Ananda, A. (2020). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi. *digilibadmin.unismuh.ac.id*, 58.
- Azwardi. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Syariah Kuala University Press.
- Ananda, A. (2020). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi. *digilibadmin.unismuh.ac.id*, 58.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Februari 6). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,%2C01%20persen%20\(yoy\)](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,%2C01%20persen%20(yoy)).
- Bank Indonesia. (2022). *Data Inflasi Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.
- Blandina, S., Fitriani, A. N., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindari Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Ojs.unpkediri.ac.id*, 7 No 2, 181–190.
- Elena, M. (2023, Februari 22). Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk, Ekonomi Negara Maju Menuju Resesi! *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230222/9/1630581/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-ekonomi-negara-maju-menuju-resesi>.
- Fanani, A., & Suselo, D. (2021). Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal.umsb.ac.id*, 12.

- Fatihah, N. (2022, November 1). *Apa Penyebab dan Jenis-jenis Inflasi? Pahami Macam-macam Inflasi Yuk!* <https://landx.id/blog/apa-penyebab-dan-jenis-jenis-inflasi-pahami-macam-macam-inflasi-yuk/>
- Finaka, A. (2021). *Stimulus Pemerintah dalam Penanganan Covid-19*. Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/stimulus-pemerintah-dalam-penanganan-covid-19#:~:text=Pemerintah%20memutuskan%20untuk%20menambah%20anggaran,anggaran%20perlindungan%20sosial%20dialokasikan%20Rp110.>
- Finaka, A. (2022). *Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Positif*. <https://indonesiabaik.id/infografis/tahun-2021-ekonomi-indonesia-tetap-tumbuh-positif#:~:text=Sampai%20dengan%20triwulan%20III%2D2021,pertumbuhan%20sebesar%205%2C02%20persen.>
- Ginting, A. M. (2018). *Analisis Determinasi Inflasi di Indonesia. Prosiding seminar nasional, 12, No 1.* <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/108.>
- Grehenson, G. (2022). *Ekonom UGM: Kebijakan makro Harus Lebih Ketat Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023. Liputan berita.* <https://www.ugm.ac.id/id/berita/23270-ekonom-ugm-ancaman-resesi-global-2023-kebijakan-makro-harus-lebih-ketat.>
- Hadi Kusuma, P. D. (2023, Januari 9). *Lengkap! Batas-batas Wilayah Negara Indonesia.* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6504804/lengkap-batas-batas-wilayah-negara-indonesia.>
- Hariyanti, M. (2018, Mei). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.* <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman.>
- Haryono, E. (2021, Januari 4). *Inflasi 2020 Rendah.* [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230221.aspx#:~:text=Inflasi%20Indeks%20Harga%20Konsumen%20\(IHK,3%2C0%2C%20B11%25.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230221.aspx#:~:text=Inflasi%20Indeks%20Harga%20Konsumen%20(IHK,3%2C0%2C%20B11%25.)
- Heliany, I. (2021). *Peran Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Resesi Ekonomi di Indonesia. Prosiding seminar STIA, 8, No 1.* <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1362.>

- Hidayati, N., & Maskruri, M. A. (2020). Inflasi, Tingkat Pengangguran dan Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Bogor. *Jurnal manajemen kewirausahaan*, 17, No 2. <http://ejurnal.stieipwija.ac.id/index.php/jmk/article/view/474>.
- Hendartyo, M. (2022). *Anggaran Covid-19 Selama 3 Tahun mencapai Rp. 1895,5 Triliun*. <https://bisnis.tempo.co/read/1598892/airlangga-anggaran-covid-19-selama-3-tahun-mencapai-rp-1-8955-triliun>.
- Kartawinata, B. R., Koerniawati, D., Puspitasari, D., Anita, Wicaksono, G., Moridu, I., Supriadi, A., Asniwati, Ichwanudin, W., Hardiyanti, S. E., Riza, F., Utami, F., & Nugraheni, S. (2020). *Manajemen Keuangan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kemu, S. Z., & Ika, S. (2018). Transmisi Bi Rate sebagai Instrumen Untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter. *Kajian ekonomi dan keuangan*, 20 No 3. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/208>.
- Khusen, S. (2018). Kebijakan Ekonomi (Moneter dan Fiskal). *Academia.edu*. https://www.academia.edu/38071515/Kebijakan_Ekonomi_Moneter_and_Fiskal.
- Malik, A. (2023, Maret 6). *Ini Simulasi Imbal Hasil Jika Investor SR012 Lanjutkan Investasi di Sukuk Ritel SR018*.
- Natalia, F. (2022). *Kenali Krisis Ekonomi dan Resesi, Perbedaan dan Kemungkinan Dampaknya* (hlm. 1). <https://www.kompas.tv/article/333168/kenali-krisis-ekonomi-dan-resesi-perbedaan-dan-kemungkinan-dampaknya>.
- Putri, R. S. (2023). *Nilai Tukar Menguat Tajam, ini Faktor Pendorongnya*.
- Ramadhani, N. (2020, Maret 23). *Ketahui Mengapa Timbul Inflasi, Melalui 3 Teori Inflasi Ini*. *Akseleran*. <https://www.akseleran.co.id/blog/teori-inflasi/>
- Rosana, F. (2022). *Ancaman Resesi, Sri Mulyani: Tekananya Bukan Kaleng-kaleng, Jika Tak Tahan APBN Jebol* (hlm. 1). *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1650507/ancaman-resesi-sri-mulyani-tekanannya-bukan-kaleng-kaleng-jika-tak-tahan-apbn-jebol>.

- Safitri, A., & Aria, A. (2022). Pengaruh Pembayaran Non Tunai, Velocity of Money dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia. *Seminar Nasional SATIESP 2021*, 12.
- Safitri, A., & Wahyuni, S. (2020). Analisis Inflasi, Kurs Rupiah dan BI Rate Terhadap Volume Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia (2016-2018). *Borneo student research*, 1, No 3. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1058>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sungkawaningrum, F., Koerniawati, D., Sulaiman, E., Sulistyani, T., Alfakihuddin, M. L. B., Wulandari, A., Rahmad, A. S., Titi, Arthawati, S. N., & Djasuli, P. M. (2023). *Ekonomi Industri*. Nuta Media Yogyakarta.
- Tysara, L. (2022). *Apa yang terjadi jika Inflasi Tinggi? Begini Penjelasan Ahli* (hlm. 1). <https://hot.liputan6.com/read/4996337/apa-yang-terjadi-jika-inflasi-tinggi-begini-penjelasan-ahli>.
- Utami, S. N. (2021). *Isi dari UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/24/130000469/isi-dari-uu-no-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia?page=all>.
- Utami, S. N. (2023). *Mengapa Indonesia disebut sebagai Negara Kepulauan?* <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/09/180000369/mengapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-#:~:text=Namun%20tahukah%20kamu%20mengapa%20Indonesia,pulau%20melainkan%20dari%20ribuan%20pulau>.
- Wahhab, A. (2022, Juli 26). *Pahami Apa Itu Surat Berharga dan Jenis-Jenis Surat Berharga*.
- Warjiyo, P., & Solikin. (2023). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4213>.